

## SKRIPSI

### ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA SIPATUO KABUPATEN PINRANG



PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE

2025

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN  
RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN PERTUMBUHAN PADA  
KANTOR DESA SIPATUO KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:**

**SITTI RAHMATIA KADIR  
NPM: 2120203861211009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan Pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: Sitti Rahmatia Kadir
NIM	: 2120203861211009
Program Studi	: Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. B-1759/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024
Pembimbing	Disetujui Oleh : : Ismayanti, S.E., M.M. ..... .....
NIP	: 198106212023212018

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan Pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sitti Rahmatia Kadir

NIM : 2120203861211009

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B-202/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025

Tanggal Ujian : 20 Januari 2025

Disetujui Oleh :

Ismayanti, S.E., M.M.

(Ketua)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP 19710208200112 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di IAIN Parepare.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih juga kepada Ibu Pembimbing, Ismayanti M.M, atas bimbingan dan arahan berharga selama proses penulisan ini. Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Hannani M.Ag, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan fasilitas yang telah diberikan.
2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag penulis ucapan terima kasih atas dorongan dan perhatiannya.
3. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi ibu Dr. Nurfadhilah, M.M, yang telah memberikan arahan dan motivasi yang besar.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Akademik Bapak Sulkarnain SE, M.Si., yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

5. Untuk Pengaji Pertama, Bapak Dr. Zainal Said, M.H, dan Pengaji Kedua, Bapak Trian Fisman Adisaputra, SE, M.M, Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Kritik Beliau telah membantu Penulis memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.

6. Kepada Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis mengucapkan terima kasih atas pengabdian, perhatian, dan dedikasinya yang telah diberikan. Beliau semua telah menjadi bagian integral dalam proses penelitian penulis.

7. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, serta sehabat penulis ucapan terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa henti.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan masyarakat luas.

Parepare, 03 Desember 2024 M  
09 Rajab 1446 H

Penulis



Sitti Rahmatia Kadir  
NIM.2120203861211009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Rahmatia Kadir  
Nim : 2120203861211009  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 15 Oktober 2002  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektifitas, Efisiensi dan Pertumbuhan pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau disusun oleh pihak lain secara keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya akan dibatalkan secara hukum.

Parepare, 03 Desember 2024 M

09 Rajab 1446 H

Penulis



Sitti Rahmatia Kadir  
NIM.2120203861211009

## ABSTRAK

Sitti Rahmatia Kadir, NIM. 2120203861211009, Judul Skripsi *"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan Pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang"* dibimbing oleh Ismayanti.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan distribusi alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang, berdasarkan observasi awal terdapat beberapa kesaksian dari warga bahwa distribusi bantuan yang merupakan bagian dari alokasi dana desa tidak disalurkan dengan tepat, yang kemudian menimbulkan asumsi akan penyalahgunaan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana dengan menggunakan tiga rasio sebagai instrumen yakni rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan terhadap alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif dekripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah Desa Sipatuo selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang kemudian dianalisis menggunakan persamaan rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo dinilai efektif, namun kurang efisien, sementara untuk pertumbuhan alokasi dana desa dinilai rendah. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dinilai efektif dan dibuktikan dengan rata-rata nilai persentase rasio efektivitas sebesar 97,32%. Sedangkan untuk efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dinilai kurang efisien melalui nilai rata-rata persentase rasio efisiensi sebesar 97,71%. Terakhir pertumbuhan alokasi dana desa dinilai masih sangat rendah dengan rata-rata persentase rasio pertumbuhan sebesar 0,66%. Sebagai kesimpulan dari ketiga rasio yang digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo, dinyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sipatuo dinilai efektif namun tidak efisien, serta memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi, Keuangan Daerah, Pertumbuhan

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN DEPAN .....i

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI .....ii

KATA PENGANTAR .....iii

ABSTRAK .....vii

DAFTAR ISI .....viii

DAFTAR GAMBAR .....x

DAFTAR TABEL .....xi

DAFTAR LAMPIRAN .....xii

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....xiii

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang .....1
- B. Rumusan Masalah .....9
- C. Tujuan Penelitian .....10
- D. Manfaat Penelitian .....10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan .....12
- B. Tinjauan Teori .....19
- C. Kerangka Konseptual .....33
- D. Kerangka Pikir .....36

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....38
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....39
- C. Populasi dan Sampel .....39
- D. Jenis dan Sumber Data .....39
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....40

F. Definisi Operasional Variabel .....	42
--	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
-----------------------------	----------



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Konsep Pengelolaan Dana	34
2	Kerangka Konsep Rasio Efektivitas	34
3	Kerangka Konsep Rasio Efisiensi	35
4	Kerangka Konsep Rasio Pertumbuhan	35
5	Kerangka Pikir Penelitian	37
6	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sipatuo	45
7	Grafik Anggaran dan Realisasi ADD Desa Sipatuo (2019-2023)	46
8	Grafik Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Sipatuo (2019-2023)	46

## DAFTAR TABEL

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sipatuo (2021-2023)	8
2	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	26
3	Kriteria Pertumbuhan Keuangan Daerah	28
4	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	30
6	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	42
7	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah	43
8	Kriteria Pertumbuhan Keuangan Daerah	44
9	Anggaran dan Realisasi ADD Desa Sipatuo (2019-2023)	47
10	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas ADD Desa Sipatuo (2019-2023)	51
11	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi ADD Desa Sipatuo (2019-2023)	54
12	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan ADD Desa Sipatuo (2019-2023)	58

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	Terlampir
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	Terlampir
3	Surat Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
4	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Terlampir
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sipatuo Tahun Anggaran 2019-2023	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar Huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke Huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dhomma	U	U

b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ٰو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

## 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تا / يي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yakni:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Berikut adalah Contohnya:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◦), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّاَنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu ‘ima*

عَدْوُ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِيَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ڻ (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> ( <i>bukan asy- syamsu</i> )
الْزَلْزَلُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>bukan az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونٌ	: <i>ta 'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi ‘umum al-lafzlābi khusus al-sabab*

### 9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِيْنَ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa māMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhiBakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*AbūNasral-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)*

*NaṣrHamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrHamīd (bukan: Zaid, NaṣrHamīdAbū)*

## B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhūwata 'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

د	=	بدون
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعہ
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dana desa merupakan komponen yang penting dalam perekonomian pada suatu desa, pengelolaan dana yang baik dapat berperan sebagai instrumen penting dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat desa. Pengadaan dana desa ditunjukkan untuk dapat mengurangi kesejangan dan meningkatkan kemandirian desa. Namun, seringkali masalah yang dihadapi berkaitan dengan tidak efektifnya pengelolaan dana desa yang dapat direfleksikan dari perbandingan target dan realisasi tujuan-tujuan pembangunan yang telah dianggarkan diawal. Peran penting dana desa memiliki kapabilitas untuk mendukung keuangan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan berbagai layanan publik dan proyek pembangunan<sup>1</sup>. Apabila merujuk pada definisi dana desa yang menyatakan bahwa dana desa merupakan sumber keuangan yang dialokasikan khusus untuk pemerintah daerah di pedesaan yang difungsikan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa<sup>2</sup>.

Dana desa ditunjukkan untuk membangun kemandirian desa. Tujuan ini dicapai melalui beberapa pendekatan yang diantaranya melalui peningkatan kesejahteraan dengan bantuan langsung tunai atau program kepada rumah tangga

<sup>1</sup> Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 10, no. 1 (2017): 10–19. h. 16

<sup>2</sup> Minarni Anaci Dethan, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis,” *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 15–19.

miskin. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan, upaya ini mengilustrasikan dana desa sebagai sumber daya keuangan untuk program-program pembangunan seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pejabat lokal dan masyarakat<sup>3</sup>. Pengelolaan dana desa memiliki dampak yang signifikan sehingga pengelolaan tersebut membutuhkan adanya transparansi, pengelolaan dana yang transparan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S 17:35)<sup>4</sup>:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”

Berdasarkan ayat diatas didapatkan gambaran untuk selalu bersifat jujur dalam berbagai situasi. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kejujuran dalam pengelolaannya akan mendatangkan kebaikan baik bagi pejabat desa maupun kepada masyarakat. Transparansi juga digambarkan dengan empat unsur yakni *Shiddiq* (Benar), *Amanah* (Dapat dipercaya), *Fathanah* (Cerdas), dan *Tabligh* (Komunikatif)<sup>5</sup>.

Desa Sipatuo merupakan salah satu desa di Kabupaten Pinrang, seperti desa pada umumnya, Desa ini memiliki pengelolaan dana sebagai bentuk otonomi daerah.

<sup>3</sup> Ainin Azhari and Dwi Suhartini, “Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19,” *Prosiding SeNAPaN (Seminar Nasional Akuntasi UPN Veteran JATIM)* 1, no. 1 (2021): 407–17.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Isra' Ayat 35

<sup>5</sup> Mahlel Mahlel, Muhammad Ridwan, and Nasirwan Nasirwan, “Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen),” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2016): h. 9

Secara umum melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang diketahui bahwa salah satu komponen keuangan yang dinilai prima adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama lima tahun terakhir selalu mencapai realisasi diatas 90% yang menggambarkan salah satu kapabilitas Desa dalam mengelola dana. Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat adanya potensi rekayasa dan manipulasi dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam hal distribusi yang dinyatakan oleh masyarakat bahwa alokasi dana desa masih tidak dilaksanakan secara merata. Pengelolaan dana desa yang kurang maksimal dapat mengarah pada kurangnya efektivitas maupun efisiensi dana.

Efektivitas dana desa secara otomatis akan berdampak secara positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan desa, sehingga kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian Atmojo et.al (2017) dijelaskan beberapa tantangan pengelolaan dana desa meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan pejabat desa yang menyebabkan kurang efektif dan efisiennya alokasi dana desa<sup>6</sup>. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana desa adalah dengan memperkuat kerangka kelembagaan melalui pengembangan kapasitas dengan pendidikan dan pelatihan, dan menerapkan

<sup>6</sup> Muhammad Eko Atmojo et al., “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo,” ARISTO 5, no. 1 (2017): h. 130

sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kinerja desa dalam suatu kurun waktu<sup>7</sup>.

Alokasi dana yang efektif diasumsikan mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan proyek dan infrastruktur yang berpotensi mempermudah kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta peluang kerja mereka<sup>8</sup>. Upaya untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dapat diawali dengan adanya peningkatan kapasitas administratif. Langkah selanjutnya dapat difokuskan pada penggunaan dana yang tepat, analisis terhadap kebutuhan desa yang dapat mengarah pada peningkatan potensi desa diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi dana desa<sup>9</sup>.

Ukuran efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, yang berarti bahwa seluruh program yang telah direncanakan harus dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa<sup>10</sup>. Efektivitas dana desa akan menjadi ukuran untuk meningkatkan alokasi anggaran pada periode selanjutnya. Selain itu, prioritas pembangunan pada suatu desa juga menjadi suatu ukuran, prioritas pembangunan yang sifatnya terbuka

---

<sup>7</sup> Agung. A. I. N Marhaeni, I Ketut Subidia, and Andika Gede, *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat - Membangun Desa, Membangun Indonesia*, 1st ed., vol. 1 (Bali: Sastra Utama, 2019). h. 122

<sup>8</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): h. 205

<sup>9</sup> Agung. A. I. N Marhaeni, I Ketut Sudibia, and Gede Andika, *Dana Desa : Strategi Pengentasan Kemiskinan Indonesia - Membangun Desa & Menghapus Lingkaran Seta Kemiskinan*, 2nd ed. (Bali: Sastra Utama, 2020). h. 38

<sup>10</sup> Jovanca Mamuaja, Freddy Kawatu, and Anita Kambey, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *JAIM: Jurnal Akuntasi Manado* 2, no. 2 (2021). h. 255

atau dapat memberikan dampak secara luas dinilai akan berkontribusi lebih besar bukan hanya pada desa namun juga pada kecamatan hingga provinsi, terlebih lagi apabila desa yang bersangkutan telah mengetahui potensi-potensi yang dapat dikembangkan<sup>11</sup>.

Pengelolaan dana desa diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap desa tersebut, refleksi terhadap dampak pengelolaan dana desa yang efektif dijelaskan oleh Sumarni (2020) bahwa pengelolaan dana desa yang efektif berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan proses pembangunan daerah secara menyeluruh, serta mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah<sup>12</sup>. Sementara gambaran yang diberikan oleh Irmansyah et.al (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa yang efektif, beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh desa dapat terpecahkan, masyarakat juga merasakan adanya perubahan signifikan dengan adanya pembangunan desa, serta akses yang semakin mudah<sup>13</sup>. Beberapa ilustrasi terhadap dampak signifikan dana desa kepada masyarakat meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan membantu masyarakat untuk

<sup>11</sup> Novia Anggraini, Iwan Harsono, and Siti Sriningsih, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2024).h. 6

<sup>12</sup> Mutia Sumarni, “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 5, no. 1 (2020): 77–90. h. 88

<sup>13</sup> Irmansyah Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021). h. 1091

memperoleh hunian yang layak, tujuan dana desa mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>14</sup>.

Pengelolaan dana desa juga dapat direfleksikan secara spesifik pada beberapa aspek diantaranya adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat<sup>15</sup>. Rasio efektivitas juga dapat mencerminkan seberapa jauh atau seberapa besar ketercapaian antara dana desa yang disediakan<sup>16</sup>, meskipun demikian terdapat hal lain yang dapat mencerminkan efektivitas dana desa. Dampak dari efektivitasnya dana desa juga tercermin dari kemajuan yang dialami oleh desa, dan peningkatan aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat<sup>17</sup>.

Efisiensi akan suatu pengelolaan dana desa direfleksikan layaknya efektivitas, perbedaan keduanya terletak pada capaiannya, rasio efektivitas berfokus pada seberapa besar keberhasilan yang dicapai yang dalam penelitian ini merefleksikan seberapa target pembangunan yang dicapai dengan realisasi dana desa pada tahun berjalan. Sedangkan, rasio efisiensi merefleksikan seberapa besar kemampuan yang

---

<sup>14</sup> Aferiaman Telaumbanua and Noferius Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)* 1, no. 1 (2022). h. 121

<sup>15</sup> Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, and Sri Yuni Widowati, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020),” *SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 19, no. 2 (2021). h. 60

<sup>16</sup> Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, and Trisnia Widuri, “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021),” *Jurnal Mahasiswa - Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 3 (2022). h.132

<sup>17</sup> Andi Nurwana, Agus Purwanto, and Akbar Akbar, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone,” *PRECISE: Journal of Economic* 2, no. 1 (2023). h. 12

dimiliki oleh sumber daya (Alokasi Dana Desa) untuk memberikan manfaat kepada masyarakat desa sebagai penerima manfaat<sup>18</sup>.

Selanjutnya adalah rasio pertumbuhan, rasio pertumbuhan dalam konteks dana desa dapat didefinisikan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan pengelolaan dan realisasi dana dari tahun ke tahun<sup>19</sup>. Rasio pertumbuhan dana desa yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio ini juga menunjukkan kinerja pemerintah desa yang dinilai baik<sup>20</sup>. Pertumbuhan dana desa yang memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi ekonominya, secara jelas gambaran yang diberikan adalah peningkatan dana desa dari tahun sebelumnya<sup>21</sup>.

Observasi awal yang dilakukan tidak hanya melalui data sekunder BPS Kabupaten Pinrang, dan masyarakat, namun juga secara langsung pada Kantor Desa Sipatuo, berdasarkan data yang didapatkan gambaran mengenai anggaran dan realisasi dana desa selama tiga tahun terakhir (2021-2023), data ini menunjukkan

<sup>18</sup> Aning Fitriana, *Analisis Laporan Keuangan*, ed. Reza Rahmadi Hasibuan, 1st ed. (Banyumas: Malik Rizki Amanah, 2024).

<sup>19</sup> Rasta Seviafani Hidayati, Norita Citra Yuliarti, and Moh Halim, "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan," *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 6, no. 2 (2023). h. 240

<sup>20</sup> Via Vitaloka, Yuni Firayanti, and Marhamah Marhamah, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio Pertumbuhan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang)," *SINERGI - Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 8 (2024). h. 744

<sup>21</sup> Nur Asiah, Addiarrahman Addiarrahman, and Muthmainnah Muthmainnah, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin," *Al-Dalil: Jurnal Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023). h. 17

adanya fluktuasi, data anggaran dan realisasi dana desa pada Desa Sipatuo dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sipatuo (2021-2023)**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2021	1.368.497.000	1.337.882.000
2022	964.369.000	933.124.000
2023	1.377.297.000	1.370.827.416

Sumber: Kantor Desa Sipatuo (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui bahwa anggaran dana desa bersifat fluktuatif yang dibuktikan dengan adanya penurunan di tahun 2022, hal yang sama juga terlihat pada realisasi anggaran, penurunan terjadi pada tahun 2022. Tidak hanya itu, apabila merujuk pada efektivitasnya terlihatnya adanya penurunan persentase efektivitas pada tahun 2022 sebesar 1 persen (97%) dibandingkan tahun sebelumnya (98%), dan kembali meningkat di tahun 2023 (99%). Dengan demikian ilustrasi yang didapatkan dari pengelolaan dana desa menunjukkan adanya pengelolaan dana desa yang efektif, namun dengan adanya pernyataan masyarakat maka dibutuhkan analisis yang lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sipatuo.

Berdasarkan fenomena yang mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan desa yang baik, serta efektivitas yang diperoleh dari data awal, pernyataan masyarakat menunjukkan adanya ketidak selaras antara gambaran kinerja dan fakta potensial pada Desa Sipatuo, didukung oleh gambaran-gambaran yang diperoleh dari berbagai refensi ilmiah yang bersifat empiris, peneliti mengasumsikan bahwa dengan adanya salah satu unsur keuangan desa yang menonjol atas kinerjanya, maka aspek

lain dalam pengelolaan dana desa juga memiliki kinerja yang baik pada Desa Sipatuo. Untuk dapat membuktikan asumsi ini dibutuhkan analisis secara mendalam, dan komprehensif terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan akumulasi informasi ini maka peneliti tertarik dan mengangkat “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Pertumbuhan Pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang” sebagai judul penelitian untuk membuktikan asumsi awal, dan menganalisis bentuk pengelolaan dana desa yang baik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dengan berpedoman pada berbagai referensi ilmiah dan empiris, didapatkan gambaran mengenai kinerja keuangan desa yang dapat mengarah pada pengelolaan dana desa yang baik. Dengan demikian maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio efektivitas pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio efisiensi pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian secara umum ditunjukkan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio efektivitas pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio efisiensi pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa apabila diukur dari rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang

### D. MANFAAT PENELITIAN

Selain untuk membuktikan kebenaran dari asumsi peneliti, penelitian dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. secara umum manfaat yang diharapkan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua yakni manfaat teoritis, dan manfaat praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman, informasi, dan wawasan mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang baik, serta bagaimana pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif dan mampu menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

2. Manfaat Praktis. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk praktik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, dan bagi semua pihak seperti pemerintah desa, dan akademisi untuk dapat menjadi sebuah referensi untuk riset-riset serupa dimasa depan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber-sumber ilmiah yang dapat digunakan dalam mendukung penelitian yang dilaksanakan, sebagaimana dengan adanya penelitian terdahulu, berbagai argument yang terkandung didalamnya dapat digunakan membangun asumsi awal, dan merumuskan berbagai teori relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian, terdapat beberapa hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian Dwi Supriati dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa dari tahun 2016 hingga 2020 yang menjadi ukuran kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa, selain itu terdapat tren pertumbuhan pendapatan desa. Pengelolaan dana desa juga dioperasionalkan secara aktif dalam bentuk investasi pengembangan dan layanan masyarakat. Secara keseluruhan rasio efektivitas pengelolaan dana desa menunjukkan

bahwa dana desa dinilai efektif dengan adanya pendapatan yang terus meningkat dan pengeluaran produktif yang berdampak pada kondisi desa secara umum<sup>22</sup>.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di lakukan terletak pada teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2016-2020.

Penelitian Idam Eltri Zebua dkk dengan judul “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Tumori dinilai efektif apabila ditinjau dari rasio efektivitas yang menunjukkan tingkat efektivitas 100% pada 2019 dan 2020, meskipun mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 penurunan ini dinilai tidak terlalu signifikan karena penurunan yang dimaksud tidak mencapai 1%. Hasil penelitian menunjukkan gambaran kinerja pemerintah desa yang aktif dan efektif dalam mengelolah dana desa untuk terus mencapai target realisasi dengan berbagai program kerja yang juga berdampak dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat pada desa tersebut<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Dwi Supriati, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021). h. 66

<sup>23</sup> Idam Eltri Zebua et al., “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Dan Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023). h. 6877

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif kemudian perbedaannya terletak pada penelitian yang akan dilakukan pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang tidak akan digunakan untuk penelitian yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Penelitian Rani Anjeli dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa menunjukkan penurunan hingga tahun 2021, pada tahun 2021 diketahui bahwa kinerja keuangan desa mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya pemulihan secara perlahan, secara umum pengelolaan dana desa di Desa Tanjung memiliki sifat yang dinamis, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan desa dalam hal pengelolaannya dibutuhkan adanya perencanaan strategis yang dinilai dapat menunjang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar terus mengalami pertumbuhan dan semakin efektif dimasa yang akan datang<sup>24</sup>.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian yang diteliti yakni kantor desa dan persamaan kedua terletak pada variabel independen yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif

<sup>24</sup> Rani Anjeli, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024). h. 50

perbedaan kedua terletak pada tahun periode laporan keuangan yang digunakan yaitu 2017-2021.

Penelitian Erviana Putri dkk dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa apabila meninjau dari rasio pertumbuhannya pengelolaan dan desa di Desa Sungai Baru dinilai rendah, rasio pertumbuhan selama lima tahun (2018-2022) mencapai pertumbuhan yang kurang dari 25%, hal ini juga diukur dari pertumbuhan belanja alokasi dana desa, yang artinya bahwa pemerintah desa tidak melakukan pembelanjaan yang produktif sehingga pertumbuhan dana desa setiap tahunnya juga tidak diberikan akibat kurang efektifnya dana desa yang dikelolah dalam hal realisasi terutama untuk melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kondisi desa tersebut secara umum<sup>25</sup>.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang akan di gunakan terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan Observasi perbedaan kedua menggunakan teknik Analisis data dengan pendekatan deskriptif Kualitatif.

---

<sup>25</sup> Erviana Putri, Raju Maulana, and Edi Susanto, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir,” Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB 1, no. 2 (2024). h. 134

Penelitian Salmah dengan judul "Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menganalisis rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan menggunakan data dana desa tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentasi efektivitas dinilai tinggi dengan persentasi 100%. Sementara untuk rasio pertumbuhan menunjukkan adanya nilai negatif yang disebabkan oleh kurang maksimalnya pendapatan yang diterima pemerintah Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menganalisis rasio efektivitas dan pertumbuhan sama halnya dengan penelitian yang dilaksanakan saat ini, namun penelitian ini dilaksanakan di Desa Corawali sementara penelitian yang dilaksanakan berlokasi di Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang<sup>26</sup>.

Penelitian Yayu Sri Eva dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jampu Kabupaten Soppeng, dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis data dengan menggunakan rumus rasio terhadap efektivitas dan pertumbuhan dana desa, penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan deksriptif kuantitatif untuk merumuskan hasil penelitian. Hasil penelitian ini

---

<sup>26</sup> Salmah, "Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

menunjukkan tingkat efektivitas dana desa pada Desa Jampu dengan persentase diatas 80%, sementara pertumbuhan juga dinilai cukup baik pada persentase 67%. Penelitian ini sebagaimana dengan penelitian yang dilaksanakan memiliki kemiripan dalam rasio yang dianalisis yakni efektivitas dan pertumbuhan sementara untuk perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun observasi yakni 2015 hingga 2018<sup>27</sup>.

Persamaan peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kedua variabel independen yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan persamaan yang kedua yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga tahun periode penelitian yang berbeda 2019.

Penelitian Fadli Alamsyah dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ADD apabila ditinjau dari rasio efisiensi menunjukkan ukuran yang tidak efisien, namun ukuran efektivitas dari ADD dinilai baik dengan persentase sebesar 96,57%, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai kurang efisiensi, namun tergolong

---

<sup>27</sup> Yayu Sri Eva, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

efektif yang mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan desa dapat dicapai namun memerlukan biaya dan sumber daya yang cukup banyak<sup>28</sup>.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan karena rasio yang digunakan sama yakni rasio efektivitas dan efisiensi, sementara perbedaannya terletak pada metode dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif, sementara penelitian yang dilakukan menerapkan metode kuantitatif deskriptif. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga dinilai sebagai perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian Andi Nurwana dan Agus Purwanto Akbar dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Leppangeng Kabupaten Bone dinilai cukup baik, hal ini direfleksikan pada rasio efektivitas yang berada diatas 90% atau mendekati 100%, sedangkan untuk rasio efisiensi dinilai kurang efisien dengan persentase 99,75%<sup>29</sup>.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan adalah kesamaan pada rasionya yakni rasio efektivitas dan efisiensi, sementara perbedaan yang didapatkan hanya terletak pada lokasi dan tahun observasi dari penelitian ini, yang mana penelitian yang dilakukan berlokasi Kabupaten Pinrang, sementara penelitian ini

<sup>28</sup> Fadli Alamsyah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur” (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

<sup>29</sup> Nurwana, Purwanto, and Akbar, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone.”

dilaksanakan di Kabupaten Bone. Begitupula dengan tahun observasi, penelitian ini melakukan observasi pada tahun anggaran 2019 hingga 2021, sementara penelitian yang dilakukan mengobservasi tahun anggaran 5 tahun terakhir (2019-2023).

Beberapa penelitian diatas tentu hanya sebagian dari sekian banyaknya penelitian-penelitian yang dapat dijadikan sebagai tinjauan empiris yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Sumber-sumber referensi seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian serta sumber-sumber empiris lainnya. Penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai sumber empiris dinilai cukup relevan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana desa baik secara umum maupun dalam perspektif keuangan syariah, penelitian-penelitian tersebut juga memberikan gambaran mengenai ukuran efektivitas dan ukuran pertumbuhan positif terhadap dana desa. Penelitian-penelitian yang relevan juga berfungsi untuk menguji kesesuaian hasil penelitian terdahulu dengan subjek dan objek dalam penelitian ini.

## **B. TINJAUAN TEORI**

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasar pada fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, untuk dapat mendukung berbagai faktor yang ditemukan dalam proses penelitian ini dibutuhkan adanya dukungan teori, teori ini dapat berasal dari berbagai sumber referensi sekunder, seperti buku, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber referensi lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan membangun kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, rasio

efektivitas, dan rasio pertumbuhannya, dengan demikian adapun beberapa tinjauan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana berkaitan erat dengan manajemen keuangan, dana sebagai sumber keuangan memerlukan adanya manajemen yang baik agar dapat mencapai fungsi maksimalnya, kegiatan manajemen keuangan dalam upaya untuk mengoptimalkan keuangan perusahaan atau instansi dikenal sebagai bentuk pengelolaan dana<sup>30</sup>. Menurut Kasmir manajemen keuangan mengarah pada segala bentuk aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional dari suatu perusahaan atau instansi, pengelolaan dana yang dilakukan tidak lain adalah demi untuk tercapainya tujuan perusahaan, serta memaksimalkan efektivitas dan efisiensi aset yang dimiliki<sup>31</sup>.

Berdasarkan gambaran diatas maka manajemen keuangan menurut Kasmir dapat disimplifikasikan dalam tiga komponen utama yakni (1) Memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional; (2) Mengelola dana dengan se-efisien mungkin; dan (3) Mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam operasi keuangan yang berkaitan erat dengan modal, pengeluaran, dan

---

<sup>30</sup> Yudi Supiyanto et al., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, ed. Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, 1st ed. (Mataram: Sanabil Publishing, 2023).

<sup>31</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 9th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

pengelolaan dana, rangkaian dari manajemen keuangan yang baik akan mengarah pada kinerja keuangan yang baik pula<sup>32</sup>.

Menurut Kasmir kinerja keuangan dapat tercermin melalui laporan keuangan yang berisi berbagai informasi yang dapat memperlihat kinerja dari setiap komponen keuangan yang dikelola dalam suatu periode<sup>33</sup>. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi dan membenahi berbagai kekurangan yang dimiliki perusahaan agar tetap memiliki kekuatan atau daya saing. Informasi terkait kinerja keuangan sangat penting untuk banyak pihak terutama pada pihak mitra atau *stakeholder* untuk menganalisis potensi keberlansungan perusahaan tersebut<sup>34</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, apabila dikaitkan dengan konteks pengelolaan dana terkhusus dana desa, diketahui bahwa pengelolaan dana merupakan bentuk manajemen keuangan yang dilakukan untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, agar dana yang diperoleh mampu membiayai kegiatan operasional secara efektif, dana desa diberikan kepada pemerintah desa dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis program baik yang bersifat bantuan langsung kepada masyarakat maupun dalam bentuk pembangunan fisik, pengelolaan dana desa yang efektif sesuai dengan manajemen keuangan yang

---

<sup>32</sup> Samsurijal Hasan et al., *Manajemen Keuangan*, ed. Fachrurazi Fachrurazi, 1st ed. (Banyumas: Pena Persada, 2022). h. 8

<sup>33</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

<sup>34</sup> Ana Fitriyatul Bilgies et al., *Manajemen Keuangan*, ed. Agung Anggoro Seto, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). h. 10

baik pada umumnya akan meningkat kinerja keuangan perusahaan yang akan menjadi pertimbangan penting untuk memberikan lebih banyak atau proporsi dana desa yang lebih banyak pada periode selanjutnya.

Tujuan dari manajemen keuangan tidak lain adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dalam kegiatan operasional perusahaan, manajemen keuangan juga berkaitan pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan yang mengarah pada pengembangan usaha secara berkelanjutan<sup>35</sup>.

Sumber dana yang prima dalam suatu instansi merupakan kunci utama untuk perkembangan instansi tersebut, urgensi akan manajemen keuangan dalam suatu instansi menentukan apakah dana yang dikelola akan bedampak positif, atau malah dinilai merugikan, beberapa fungsi manajemen keuangan menurut Jaya dkk adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, perencanaan yang baik mampu memberikan prediksi yang baik mengenai potensi yang dimiliki perusahaan dimasa yang datang sebagaimana perencanaan meliputi perencanaan alokasi dana, pengelolaan utang, dan komponen keuangan lainnya dalam perusahaan atau instansi.

---

<sup>35</sup> Yudi Supiyanto et al., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, ed. Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, 1st ed. (Mataram: Sanabil Publishing, 2023). h. 15

<sup>36</sup> Asri Jaya et al., *Manajemen Keuangan*, ed. Fachrurazi, 1st ed. (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023). h. 4

- b. Pengendalian. Pengendalian dana dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan komponen keuangan dalam perusahaan, menilai prioritas perusahaan dan menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- c. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, evaluasi akan menunjukkan aspek mana yang perlu dikembangkan, dan apa yang menjadi penghambat kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu.
- d. Penganggaran. Penganggaran merupakan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan, alokasi dana yang baik didasarkan pada prioritas dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan agar dana yang dikelola memberikan hasil semaksimal mungkin.
- e. Pelaporan. Setelah melakukan semua rangkaian kegiatan keuangan, pelaporan dilaksanakan untuk merangkum aktivitas keuangan perusahaan dalam suatu periode, laporan keuangan kemudian digunakan dalam proses analisa sebelum kemudian dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan dana dalam konteks dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, meskipun menjadi sebuah bentuk otonomi daerah, atau kebebasan keuangan yang diberikan kepada daerah. Pengelolaan dana yang baik adalah tanggung jawab pemerintah desa untuk dilaksanakan, pengelolaan dana desa yang baik tidak hanya memberikan manfaat

pada hasil yang dapat dicapai melalui pendanaan tersebut. Namun, pengelolaan dana desa yang baik akan mengarah pada peningkatan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana desa pada suatu lokasi. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan pengelolaan dana, selain laporan keuangan, dibutuhkan pula adanya analisis laporan keuangan.

## 2. Analisis Rasio Keuangan

Pengukuran terhadap komponen keuangan terkhusus laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan banyak pendekatan, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis rasio yang merupakan suatu metode yang didesain untuk menjelaskan keterkaitan antar komponen dalam laporan keuangan<sup>37</sup>. Analisis rasio dinilai bermanfaat dalam mengilustrasikan perbandingan komponen dalam laporan keuangan baik dalam perusahaan sendiri maupun antar perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan rasio tidak hanya digunakan dalam perusahaan, namun dapat pula digunakan dalam berbagai instansi yang memiliki administrasi keuangan.

Menurut Harahap analisis rasio keuangan digunakan untuk membantu dalam proses evaluasi kinerja keuangan, dibandingkan dengan berbagai metode yang dapat digunakan, analisis rasio dinilai sebagai metode paling efektif dalam mengukur kinerja dan prestasi keuangan. Manfaat yang didapatkan dari analisis

---

<sup>37</sup> Ely Siswanto, Manajemen Keuangan Dasar, 1st ed. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021). h. 25

ratio keuangan meliputi (1) Mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode; (2) Mengetahui kelemahan dan kekurangan perusahaan; (3) Mengetahui kelebihan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan; (4) Menjadi bahan dan informasi utama dalam penilaian kinerja; dan (5) Menjadi bahan dan informasi penting dalam melakukan perbandingan<sup>38</sup>. Terdapat banyak rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, namun dalam penelitian ini rasio yang digunakan mengarah pada analisis pengelolaan alokasi dana desa yang hanya mengakup efektivitas dan pertumbuhan sehingga penggunaan rasio analisis laporan dibatasi menjadi dua yakni sebagai berikut:

#### **a. Rasio Efektivitas**

Rasio produktivitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas atau seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya, sehingga rasio ini juga dikenal dengan nama rasio efektivitas. Sementara menurut Harahap rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas atau peningkatan dari kegiatan-kegiatan unit perusahaan yang dinilai dari perbandingan nilai produksi tahun sebelumnya dan tahun faktual<sup>39</sup>. Sama halnya dengan rasio pertumbuhan, penelitian ini hendak mengukur efektivitas namun secara spesifik mengarah pada efektivitas dana desa, dengan demikian rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

---

<sup>38</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007). h. 300

<sup>39</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007). h. 311

Rasio Efektivitas. Rasio produktivitas di sisi lain menggambarkan efektivitas, dalam konteks pengelolaan dana desa, rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan membandingkan PAD yang direncanakan dengan PAD yang tercapai. Dalam penelitian ini efektivitas diukur dengan menggunakan rasio ini, dalam penelitian ini efektivitas yang diukur adalah efektivitas alokasi dana desa. Rasio ini kemudian diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Jumlah ADD}} \times 100\%$$

Sebagai sebuah rasio, ukuran dari rasio efektivitas memiliki tolak ukur yang didasarkan pada suatu persentase, nilai persentase ini menunjukkan ukuran efektivitas suatu komponen keuangan. Dalam konteks rasio efektivitas, semakin tinggi persentase atau nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa komponen keuangan yang dikelola semakin efektif. Ukuran rasio efektivitas penting dalam menentukan arah pengelolaan dana desa, dan dalam mempengaruhi arah kebijakan alokasi dana desa. Ukuran rasio efektivitas merujuk pada nilai berikut:

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Mashun<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2016).

### b. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini sesuai dengan namanya menunjukkan pertumbuhan yang terjadi pada pos-pos perusahaan dalam suatu periode tertentu atau secara berkelanjutan dari tahun ke tahun<sup>41</sup>. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk berada dalam posisi ekonomi yang sama atau lebih tinggi pada suatu periode, rasio pertumbuhan secara umum menunjukkan produktivitas perusahaan yang mana pertumbuhan merupakan harapan yang dimiliki setiap perusahaan, dengan adanya pertumbuhan yang positif maka *stakeholder* dan investor akan tertarik untuk mempertahankan kerjasama yang dimiliki dengan perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan alokasi dana desa, sehingga dari sekian banyaknya komponen dalam rasio pertumbuhan hanya akan digunakan rumus yang menggambarkan pertumbuhan yakni sebagai berikut.

Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dalam konteks pengelolaan dana desa merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan jumlah Dana Desa yang nilainya semakin besar dari satu periode ke periode selanjutnya yang secara langsung mengilustrasikan pertumbuhan positif. Rasio ini menunjukkan besaran atau pertumbuhan aset perusahaan dari tahun ke tahun, dalam penelitian ini yang diukur menggunakan rasio ini bukanlah pertumbuhan penjualan melainkan

---

<sup>41</sup> Sofyan Syafriz Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007). h. 309

pertumbuhan alokasi dana desa. Rasio ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{ADD Tahun Ini} - \text{ADD Tahun Lalu}}{\text{ADD Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Sama halnya dengan rasio efektivitas, ukuran pertumbuhan juga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan pada suatu komponen keuangan, rasio ini dinilai penting untuk mengetahui komponen mana yang seharusnya ditingkatkan dan dikurangi. Dalam konteks pengelolaan dana desa, rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar peningkatan alokasi dana desa dari tahun ke tahun, mengimplikasikan bahwa dana desa kemungkinan besar ditingkatkan untuk mendanai lebih banyak program pada desa tersebut. Untuk mengukur rasio pertumbuhan dapat digunakan ukuran sebagai berikut:

**Tabel 3. Kriteria Pertumbuhan Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Rendah	0-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Sholeh<sup>42</sup>

### c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat didefinisikan sebagai sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Sehingga rasio ini mengilustrasikan bagaimana suatu sumber

<sup>42</sup> Supriati, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar."

daya digunakan secara maksimal untuk memperoleh keutungan yang maksimal. Suatu pengelolaan dana dapat dikatakan efisien apabila pengelolaan dana tersebut dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi yang merujuk pada efisiensi juga masih dapat dibenarkan apabila *output* yang dihasilkan nilainya tetap. Namun kondisi yang dinilai tidak lagi efisien adalah ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan hasil yang didapatkan.

Menurut Mahmudi rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima dalam suatu pengelolaan keuangan, kata efisiensi merujuk pada kemampuan suatu instansi atau organisasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang lebih besar<sup>43</sup>. Dalam menjalankan suatu bentuk pemerintahan, efisiensi merupakan salah bentuk tuntutan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, sehingga untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan maka digunakan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio efisiensi dinilai sangat penting untuk mengetahui besaran pengeluaran suatu wilayah atau perusahaan untuk mendanai suatu

<sup>43</sup> Siktania Maria Dilliana and Henrikus Herdi, Manajemen Keuangan Daerah, ed. Dwi Winarni, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022). h. 27

kegiatan operasional atau program kerja yang mereka jalankan. Rasio ini akan menunjukkan apakah dana yang dikeluarkan berhasil didapatkan kembali atau mampu menciptakan kinerja atau produktivitas yang optimal. Berbeda dengan rasio efektivitas maupun pertumbuhan, nilai dari rasio efisiensi menunjukkan nilai yang berbanding terbalik, semakin besar nilai yang didapatkan maka kesimpulan yang diindikasikan menunjukkan kurang efisiennya alokasi dana, sebaliknya semakin kecil nilai yang didapatkan, mengindikasikan bahwa dana yang dikelola semakin efisien. Sebagaimana pengelolaan dana desa berbeda dengan perusahaan yang tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dana desa lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga efisiensi yang tinggi menunjukkan peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh dana desa pada desa tersebut. Ukuran rasio efisiensi dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>Kinerja Keuangan</b>
Tidak Efisien	100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Susanto<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Alamsyah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”

#### **d. Rasio Kemandirian**

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan suatu instansi untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatannya tanpa bantuan dari pihak manapun. Rasio kemandirian sangat identik dengan pemerintahan, dikarenakan alur kerja pemerintahan diawali dengan pemerintah pusat yang menurunkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Menurut Mahmudi rasio kemandirian didapatkan dengan membandingkan jumlah penerimaan dengan jumlah pendapatan eksternal. Rasio ini akan menggambarkan kemandirian keuangan yang dimiliki suatu daerah<sup>45</sup>.

Rasio kemandirian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, merujuk pada bagaimana pemerintah daerah mampu membiaya seluruh kegiatannya seperti kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendapatan daerah yang diperoleh. Kemandirian ini juga menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal, seperti pendapatan transfer berupa bantuan dana, dan pinjaman dana dari pemerintah pusat. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah digunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Dana Eksternal}} \times 100\%$$

#### **e. Rasio Keserasian**

Rasio keserasian dapat didefinisikan sebagai bentuk tindakan pemerintah daerah dengan memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki

---

<sup>45</sup> Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2016). h. 140

untuk belanja pegawai dan belanja pelayanan publik secara optimal. Belanja publik merupakan salah satu komponen penting yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Mahsun dengan mengetahui perbandingan realisasi belanja publik dan belanja daerah maka pada saat itu baru kemudian pengelolaan dana dapat dikatakan serasi<sup>46</sup>.

Untuk mengukur rasio keserasian digunakan ukuran realisasi total belanja publik dengan jumlah belanja daerah. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja publik berarti semakin besar pula biaya yang akan dialokasikan untuk investasi pembangunan yang mengarah pada penyediaan saran dan prasarana ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, untuk mengukur rasio keserasian digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### f. Rasio Desentralisasi

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, dan PAD lainnya. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yang terfokus pada pengelolaan keuangan. Proses ini melibatkan bagaimana keuangan diperoleh dan dialokasikan untuk

---

<sup>46</sup> Akhmad, Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, ed. Amir, 1st ed. (Bogor: Azkiya Publishing, 2019). h. 175

memenuhi kepentingan masyarakat dengan penerapan prinsip manajemen keuangan yang baik.

Menurut Nugraha Rasio desentralisasi fiskal digambarkan melalui perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk memaksimalkan sumber-sumber pembiayaannya sendiri dan menunjukkan derajat kemandirian fiskal daerah<sup>47</sup>. Derajat desentralisasi menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, untuk mengukur desentralisasi fiskal digunakan rumus sebagai berikut:

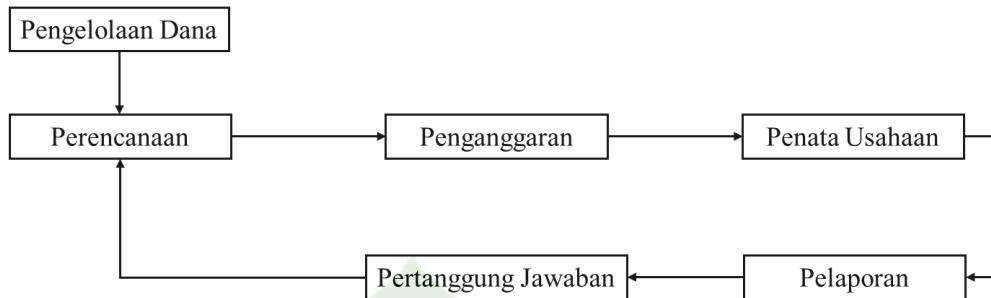
$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\% .$$

## C. KERANGKA KONSEP

### 1. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana merupakan bagian penting dalam perusahaan, maupun instansi, seluruh rangkaian kegiatan yang memerlukan adanya bentuk administrasi membutuhkan pengelolaan dana, pengelolaan dana memiliki rangkaian yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, seluruh rangkaian ini penting untuk menjamin efektif dan efisiennya pengelolaan dana, apabila diilustrasikan dalam sebuah kerangka maka pengelolaan dana dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>47</sup> Nugraha, Desentralisasi Fiskal Dan Penguatan Keuangan Daerah, ed. Baban Sobandi, 2nd ed. (Bandung: UPI Press, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017). h. 166



Gambar 1. Kerangka Konsep Pengelolaan Dana

## 2. Rasio Efektivitas

Efektivitas pengelolaan dana merujuk pada keberhasilan dari suatu manajemen dalam mengelola dana yang dipercayakan, efektivitas diukur dari penentuan terhadap target dan perbandingannya dengan hasil yang dicapai, ukuran atau persentase dari perbandingan ini yang akan mencerminkan efektivitas dari suatu kegiatan. Dalam konteks dana efektivitas dapat memberikan kontribusi positif terhadap instansi tersebut, untuk menyederhanakan efektivitas maka digunakan rasio untuk mengukur, apabila digambarkan dalam suatu konsep maka kerangka konsep dari rasio efektivitas adalah sebagai berikut.

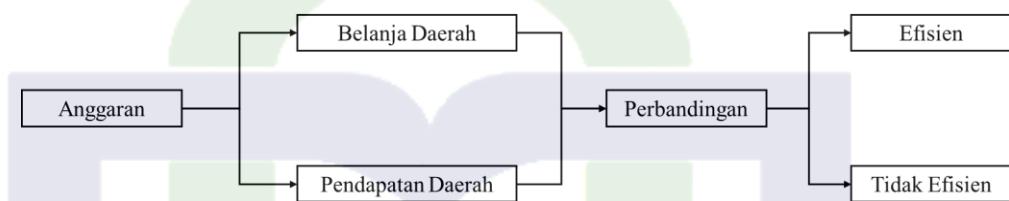


Gambar 2. Kerangka Konsep Rasio Efektivitas

## 3. Rasio Efisiensi

Efisiensi pengelolaan dana desa sama halnya dengan konsep pada perusahaan, memberikan gambaran mengenai kapabilitas atau kemampuan Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa seoptimal mungkin untuk

memberikan hasil yang maksimal, yang artinya bahwa tingkat efisiensi akan merujuk pada besaran biaya yang dikeluarkan untuk memberikan hasil yang besar. Apabila alokasi dana desa yang dikeluarkan lebih besar daripada produktivitas desa maka alokasi dana desa dinilai tidak efisien, dan sebaliknya. Untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai rasio efisiensi maka rasio efisiensi digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konsep Rasio Efisiensi

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya peningkatan yang signifikan atau terlihat secara nyata dari tahun atau periode sebelumnya, dalam konteks pengelolaan dana, pertumbuhan yang dimaksud dapat mengarah pada adanya peningkatan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitas dana yang dikelolah sebelumnya, perencanaan terhadap anggaran diajukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga meskipun dalam perencanaan dana yang diminta meningkat, pertimbangan untuk memberikan dana tersebut tetap kembali pada ukuran kinerja pada tahun sebelumnya, apabila digambarkan dalam sebuah kerangka konsep, berikut adalah kerangka konsep rasio pertumbuhan.



Gambar 4. Kerangka Konsep Rasio Pertumbuhan

#### D. KERANGKA PIKIR

Pengelolaan dana desa yang baik sebagai dijelaskan memiliki sifat yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dalam perspektif ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa secara konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan seharusnya memiliki lima pondasi yakni tauhi, khalifah, keadilan, tazkiyyah, dan al-falah. Sehingga pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan pengelolaan dana desa secara konvensional, namun dalam pelaksanaannya selain memperhatikan aspek materil, pengelolaan dana desa dalam Islam juga sangat memperhatikan aspek-aspek spiritual, dan aspek-aspek sosial sebagaimana dana desa merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat pada desa tersebut.

Pengelolaan alokasi dana desa seperti halnya manajemen keuangan lainnya juga memerlukan suatu ukuran, untuk melihat apakah dana desa telah dikelola dengan maksimal dan optimal, maka ukuran ini dapat ditinjau dari rasio efektivitas dan pertumbuhan dana desa dari tahun ke tahun. Gambaran umum yang diberikan adalah perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran, sementara untuk pertumbuhan diketahui bahwa penggunaan dana desa yang semakin meningkat diyakini mencerminkan pengeluaran produktif terhadap program-program yang

bersifat membangun dan mensejahterakan masyarakat, untuk menyederhanakan alur penelitian ini maka penelitian ini akan digambarkan dalam suatu kerangka konseptual yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dinilai efektif apabila ditinjau dari rasio efektivitas.

2. Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dinilai efisien apabila ditinjau dari rasio efisensi.
3. Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dinilai mengalami pertumbuhan positif apabila ditinjau dari rasio pertumbuhan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono metode kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang bersifat positivisme, metode ini digunakan untuk meneliti pada suatu populasi atau sampel tertentu, perbedaan metode ini dengan metode lainnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian, dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, penelitian ini dilakukan berdasarkan perumusan hipotesis yang terbentuk dari asumsi awal yang diperoleh melalui observasi dan tinjauan empiris serta teoritis yang dibangun diawal penelitian<sup>48</sup>.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dekscriptif yang merupakan bentuk analisis statistik yang dilakukan setelah mengumpulkan data, analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan tujuan untuk mendekripsikan, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan hubungannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, analisis kuantitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data-data yang bersifat statistik, dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

## **B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, lebih tepatnya di Kantor Desa Sipatuo yang berlokasi di Kecamatan Patampanua. Sementara untuk waktu pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024

## **C. POPULASI DAN SAMPEL**

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yakni laporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang. Sementara untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Sipatuo selama lima tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

## **D. JENIS DAN SUMBER DATA**

Proses penelitian melibatkan adanya pengujian terhadap hasil penelitian, untuk mendapatkan atau merumuskan hasil penelitian dibutuhkan adanya data yang berisi infomasi relevan yang dapat digunakan dalam merumuskan hasil penelitian. Data sebagai sebuah informasi memiliki jenis dan sumber yang beragam, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder<sup>49</sup> penjelasan mengenai jenis dan sumber data ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, data ini merupakan data yang belum pernah dipublikasi dan

---

<sup>49</sup> Wiratna V. Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). h. 89

memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat memberikan informasi yang bermakna.

2. Data Sekunder. Berbeda dengan data primer, data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, dengan kata lain data ini telah diolah dan dipublikasikan sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu lagi melakukan pengolahan terhadap data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui sumber-sumber seperti laporan, artikel ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber referensi lainnya yang dapat digunakan dalam mendukung argumen dalam penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan alokasi dana desa periode 5 tahun terakhir (2019-2023).

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Penelitian ini sebagaimana penelitian pada umumnya, membutuhkan adanya data untuk dapat merumuskan hasil penelitian, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti akan berperan sebagai instrumen penelitian dengan kehadiran mereka secara langsung di lokasi penelitian, dalam upaya untuk mengumpulkan data beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian, dalam prosesnya peneliti akan mencatat berbagai fenomena revelan yang terjadi di lokasi penelitian, teknik ini dinilai mampu memberikan informasi yang tidak didapatkan melalui wawancara.

---

<sup>50</sup> Ipa Hafsiyah Yakin, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Uus Supriatna, 1st ed. (Garut: Aksara Global Akademika, 2023). h. 90

2. Dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, artikel, foto, dan bebagai sumber-sumber data lainnya yang dapat digunakan dalam merumuskan hasil penelitian maupun untuk mendukung argument penelitian. Tahapan ini dinilai penting sebelum melakukan triangulasi data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan merupakan data yang kredibel.

Berbeda dengan data yang berupa informasi secara lisan, data alokasi dana desa merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan alokasi dana desa. Meskipun demikian data tersebut belum berbentuk rasio dan memerlukan adanya pengolahan telebih dahulu, untuk mengukur rasio efektivitas maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan diukur rasio efisiensi dana desa, untuk mengukur efisiensi digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sementara untuk menghitung rasio pertumbuhan dana desa maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Dana Desa} = \frac{\text{Jumlah ADD Tahun ini} - \text{Jumlah ADD Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun Lalu}} \times 100\%$$

## F. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka teoritis dan sumber empiris yang relevan, serta fakta yang didapatkan dari observasi awal, definisi terhadap variabel dalam penelitian ini memiliki makna yang luas dan beragam, untuk membatasi definisi terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini maka variabel tersebut akan didefinisikan kedalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan untuk berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.
2. Rasio Efektivitas. Rasio efektivitas menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam memaksimalkan alokasi dana desa, ukuran efektivitas dilihat dari perbandingan antara jumlah dana desa dan realisasinya pada tahun tertentu dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Selain rumus diatas, digunakan ukuran berikut sebagai tolak ukur kriteria efektivitas terhadap keuangan daerah yang diukur sebagai berikut:

**Tabel 5. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Mohamad Mahsun<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.

3. Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi merupakan ukuran yang menggambarkan besaran dana desa yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai program yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas daerah. Untuk mengukur efisiensi alokasi dana desa digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berbeda dengan rasio efektivitas, ukuran dari rasio efisiensi berbanding terbalik, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa dana desa dikelola dengan kurang efisiensi, sebaliknya apabila nilainya rendah, menandakan bahwa dana desa dikelolah dengan efisiensi, ukuran kriteria efisiensi dapat digunakan indikator berikut:

**Tabel 6. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efektif	Kurang dari 60%

Sumber: Susanto<sup>52</sup>

4. Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan ukuran pertumbuhan dana desa dibanding dengan tahun sebelumnya, untuk mengetahui pertumbuhan dana desa digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Dana Desa} = \frac{\text{Jumlah ADD Tahun ini} - \text{Jumlah ADD Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun Lalu}} \times 100\%$$

<sup>52</sup> Alamsyah, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur."

Sama halnya dengan ukuran efektivitas untuk mengukur pertumbuhan dibutuhkan sebuah ukuran agar diketahui dengan jelas bahwa pertumbuhan yang terjadi tergolong dalam kategori rendah, sedang atau tinggi, demikian digunakan ukuran sebagai berikut:

**Tabel 7. Kriteria Pertumbuhan Keuangan Daerah**

Nilai Rasio	Kriteria
0% – 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber: Sholeh<sup>53</sup>



<sup>53</sup> Supriati, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar." h. 27

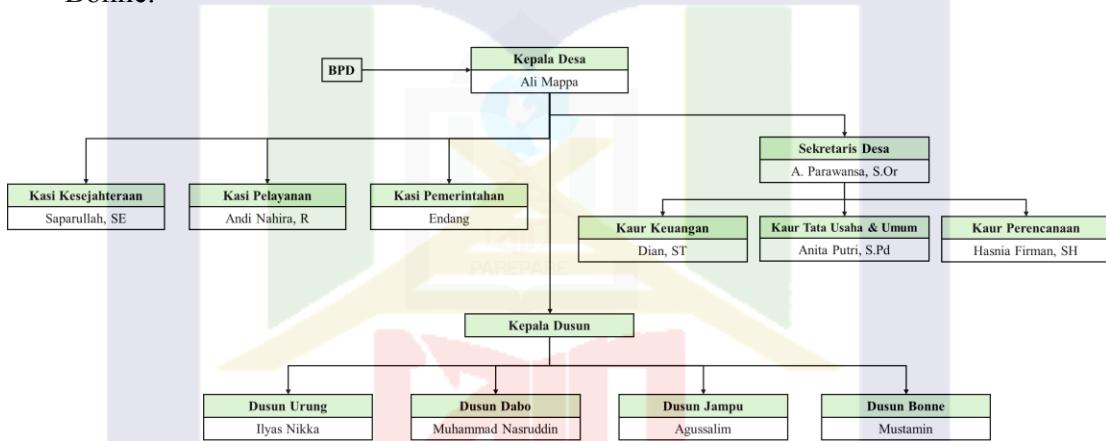
## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Desa Sipatuo

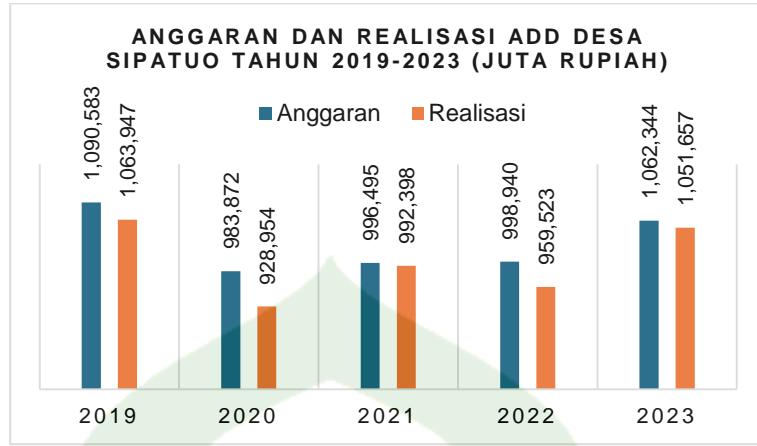
Desa Sipatuo merupakan Pemakaran dari Desa Malimpung dan merupakan satu dari sebelas Kelurahan/Desa yang terletak di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Terdapat empat Dusun yang menjadi bagian dari Desa Sipatuo yakni Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu, serta Dusun Bonne.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sipatuo

##### 2. Gambaran Umum Tata Kelola Keuangan Desa Sipatuo

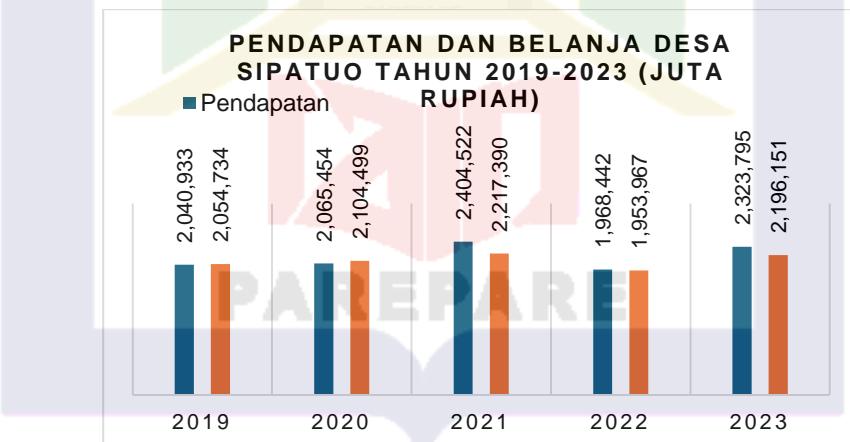
Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek dalam tata kelola keuangan Desa Sipatuo yang secara spesifik pada Alokasi Dana Desa (ADD), beberapa aspek yang dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Gambaran umum yang dibangun berdasar pada laporan keuangan selama lima tahun terakhir (2019-2023) yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Sipatuo yang dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Pemerintah Desa Sipatuo (2024)

Gambar 7. Grafik Anggaran dan Realisasi ADD Desa Sipatuo (2019-2023)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar 7 diketahui bahwa nilai terbesar anggaran dan realisasi adalah pada tahun 2019 dan 2023. Selanjutnya adalah data belanja dan pendapatan Desa Sipatuo selama lima tahun terakhir (2019-2023).



Sumber: Pemerintah Desa Sipatuo (2024)

Gambar 9. Grafik Pendapatan dan Belanja Desa Sipatuo (2019-2023)

Gambar 9 menunjukkan adanya surplus data pada dua tahun anggaran yakni tahun 2021 dan 2023, hal ini menunjukkan potensi efisiensi anggaran.

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sipatuo, secara umum besaran anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Anggaran dan Realisasi ADD Desa Sipatuo Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	1.090.583.000	1.063.946.800
2020	983.872.000	928.954.217
2021	996.495.000	992.398.198
2022	998.940.000	959.522.683
2023	1.062.344.000	1.051.657.966

Sumber: Pemerintah Desa Sipatuo (2024)

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditampilkan pada tabel 9, diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi terbesar adalah pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.090.583.000 dan 2023 sebesar Rp. 1.062.344. 000. Informasi lain yang didapatkan dari tabel ini menunjukkan bahwa selisih anggaran terbesar adalah pada tahun 2020 dengan selisih anggaran sebesar Rp. 54. 917. 783, dan selisih terkecil adalah pada tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 4.096.802. Besaran jumlah alokasi dana desa (ADD) yang diberikan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada Desa Sipatuo, setiap tahunnya perubahan terhadap jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kondisi infrastruktur, serta ketersediaan sarana dan

prasana dapat menjadi sebuah pertimbangan yang menjadi keputusan pemerintah pusat untuk memberikan anggaran kepada pemerintah desa. Selain itu, faktor lain seperti perbedaan peraturan Bupati yang ditetapkan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan.

Berdasarkan laporan yang diperoleh, terdapat beberapa konsistensi dalam belanja dan program-program yang dilaksanakan pemerintah Desa Sipatuo menggunakan ADD. Pada tahun 2019 beberapa belanja yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi belanja siltap, penyediaan penghasilan dan tunjangan tetap perangkat desa, penyediaan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif RT dan RW. Pengeluaran lainnya ditunjukkan untuk musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan di Desa, dan pengembangan sistem informasi desa. Sementara dalam hal pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan program pembinaan sanggar seni, posyandu, dan penyuluhan kesehatan. Desa Sipatuo tidak lupa terhadap infrastruktur fisik yang tercermin dari kegiatan rehabilitas jalan dan sanitasi pemukiman. Beberapa program lainnya meliputi penyelenggaraan informasi publik desa, pembinaan karang taruna, PKK, dan lembaga kemasyarakatan, serta pelatihan BUMDesa dan fasilitasi industri rumahan. Siaga terhadap bencana juga tercatat dalam ADD melalui persiapan kesiagaan bencana skala lokal, dan anggaran penanggulangan bencana.

Program ini mengalami konsistensi yang berlangsung lama, namun setiap periode tahun anggaran menunjukkan adanya pertambahan program, di tahun

2020 beberapa program yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan administrasi kependudukan. Serta pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, dan pengadaan pos kesehatan desa. Pertambahan program di tahun 2021 tergolong meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, beberapa program baru yang dilaksanakan pada tahun ini berupa pengadaan dana bantuan pelaksanaan Pilkades, penyelenggaraan PAUD dan sejenisnya, program desa siaga kesehatan, sosialisasi ketertiban umum, BIMTEK teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan BPD, serta pengadaan dana untuk penanganan keadaan mendesak.

Pada tahun 2022, dan 2023, program pemerintahan desa di tahun 2022 meliputi penyusunan RPJMD, pengelolaan administrasi dan penilaian aset desa, pembangunan dan rehabilitas sarana dan prasana kesehatan, pengadaan pos keamanan desa, dan peningkatan saluran irigasi. Peningkatan program yang dilaksanakan di tahun 2023 tidak meningkat secara signifikan, melainkan hanya bertambah sebanyak 2 program yakni penyuluhan pendidikan, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Program rehabilitas jalan yang secara rutin dilakukan di setiap tahun anggaran meliputi jalan lingkungan, jalan usaha tani, jalan desa, dan sanitasi pemukiman.

Beberapa sumber pendapatan Desa Sipatuo di tahun 2019 dan 2020 berasal dari pendapatan transfer yakni dana desa dan ADD, pendapatan lainnya

berupa bunga bank yang merupakan hasil investasi pemerintah Desa. Pendapatan ini kemudian mengalami peningkatan melalui pendapatan usaha desa di tahun 2021 hingga 2023, sehingga selama 3 tahun terakhir tercatat pendapatan pemerintah Desa Sipatuo memiliki 3 sumber pendapatan setiap tahunnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tentu diharapkan dapat menjadi motor pendorong pembangunan Desa, sehingga perlunya bentuk evaluasi terhadap ADD menjadi sebuah inisiatif untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan dengan tepat. Efektivitas merupakan salah aspek yang dapat diukur, rasio efektivitas memberikan gambaran akan kemampuan Pemerintah Desa untuk merealisasikan penggunaan ADD untuk memenuhi target belanja ADD. Persentase efektivitas menunjukkan nilai yang menggambarkan kesesuaian realisasi dan anggaran yang tinggi, sehingga semakin tinggi rasio ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan kinerja keuangan desa yang buruk. Untuk mengukur rasio efektivitas alokasi dana desa digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas ADD} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.063.946.800}{1.090.583.000} \times 100\% = 97,56\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{928.954.217}{983.872.000} \times 100\% = 94,42\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{992.398.198}{996.495.000} \times 100\% = 99,59\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{959.522.683}{998.940.000} \times 100\% = 96.05\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.051.657.966}{1.062.344.000} \times 100\% = 94,51\%$$

Hasil perhitungan yang didapatkan, selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan penjelasan yang hendak diberikan terkait dengan analisis efektivitas alokasi dana desa (ADD) Desa Sipatuo tahun 2019-2023, data yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas ADD Desa Sipatuo (2019-2023)**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas	Keterangan
2019	1.063.946.800	1.090.583.000	97,56	Efektif
2020	928.954.217	983.872.000	94,42	Efektif
2021	992.398.198	996.495.000	99,59	Efektif
2022	959.522.683	998.940.000	96,05	Efektif
2023	1.051.657.966	1.062.344.000	98,99	Efektif
Rata-Rata			97,32	Efektif

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sipatou Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa nilai efektivitas selalu berada diatas 90% dengan nilai tertinggi 99,59%, dan nilai terendah 94,42%. Sedangkan nilai rata-rata dari perhitungan ini menunjukkan ukuran efektif dengan persentase sebesar 97,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan

alokasi dana desa pada Desa Sipatuo dinilai efektif yang dibuktikan dengan perhitungan rasio efektivitas dan nilai realisasi yang mendekati target pada setiap tahunnya.

Laporan keuangan menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sipatuo sempat mengalami penurunan anggaran di tahun 2020, namun kemudian pulih dengan adanya tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini juga tercemin dari hasil pengukuran efektivitas yang dilakukan, hasil pengukuran menunjukkan angka efektivitas terendah di tahun 2020 yang hanya sebesar 94,42%, sedangkan nilai persentase efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan realisasi anggaran mencapai 99,59%. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas yang didapatkan menunjukkan persentase sebesar 97,32% yang mengindikasikan bahwa nilai rasio efektivitas tidak pernah lebih kecil dari 90% secara langsung menjelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sipatuo apabila dinilai dari segi efektivitas telah dinilai efektif. Hal ini dibuktikan dengan nilai rasio efektivitas yang tidak pernah dibawah 90% mengilustrasikan realisasi anggaran yang sangat mendekati target. Pemerintah Desa Sipatuo dalam hal ini dapat dikatakan dapat memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa dalam mendanai berbagai program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang telah di programkan sebelumnya.

Efektivitas alokasi dana desa (ADD) memiliki nilai persentase efektivitas yang berfluktuatif, nilai ini mencerminkan selisih anggaran yang semakin sedikit antara anggaran dan realisasi. Semakin tingginya persentase efektivitas ADD, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sipatuo secara efektif mampu menggunakan anggaran yang diberikan secara maksimal dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam permohonan anggaran tersebut. Tercatat bahwa persentase efektivitas tertinggi adalah pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa pada tahun ini, pemerintah Desa Sipatuo mampu menyelesaikan banyak program-program rutin dan program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

## 2. Analisis Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD)

Kinerja Pemerintah Desa Sipatuo dalam penelitian ini tidak hanya diukur dengan satu aspek saja, melainkan beberapa, aspek lain yang hendak diukur adalah efisiensi pengelolaan keuangan. Pengukuran selanjutnya ditunjukkan untuk mengetahui efisiensi keuangan Pemerintah Desa Sipatuo, komponen dalam pengukuran ini terdiri dari realisasi belanja dan realisasi pendapatan, untuk melihat gambaran umum akan kondisi belanja dan pendapatan Pemerintah Desa Sipatuo kita dapat merujuk kembali pada gambar 9. Secara umum, rasio efisiensi merupakan suatu bentuk perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan luaran baik dalam bentuk program maupun keuntungan atau pendapatan, dibandingkan dengan besaran pendapatan yang diterima atau

didapatkan dalam periode tersebut, untuk mengukur rasio efisiensi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi ADD} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.054.734.207}{2.040.933.087} \times 100\% = 100,68\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.104.499.124}{2.065.453.752} \times 100\% = 101,89\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{2.217.390.006}{2.404.522.156} \times 100\% = 92,22\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1.953.966.669}{1.968.441.585} \times 100\% = 99,26\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{2.196.151.161}{2.323.795.206} \times 100\% = 94,51\%$$

Berdasarkan hasil diatas, hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel yang mengilustrasikan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rasio efisiensi ADD Desa Sipatuo tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi ADD Desa Sipatuo (2019-2023)**

Tahun	Belanja	Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
2019	2.054.734.207	2.040.933.087	100,68	Tidak Efisien
2020	2.104.499.124	2.065.453.752	101,89	Tidak Efisien
2021	2.217.390.006	2.404.522.156	92,22	Kurang Efisien
2022	1.953.966.669	1.968.441.585	99,26	Kurang Efisien
2023	2.196.151.161	2.323.795.206	94,51	Kurang Efisien

Rata-Rata	97,71	Kurang Efisien
-----------	-------	----------------

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 11 diketahui bahwa analisis rasio efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sipatuo menunjukkan nilai efisiensi tertinggi dengan persentase sebesar 100,89% dan terendah dengan persentase 92,22%. Kedua ini tidak jauh berbeda apabila merujuk pada kriteria penilaian yang sama-sama menunjukkan makna yang merefleksikan pengelolaan keuangan Desa Sipatuo yang tidak efisien. Selain itu, nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 97,71% yang menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan ADD dinilai kurang efisien. Secara umum tabel 11 menunjukkan pengelolaan ADD yang kurang efisien dibuktikan dengan nilai rasio efektivitas dengan nilai yang mendekati 100 hingga diatas 100 pada setiap tahunnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui laporan keuangan Pemerintah Desa Sipatuo diperoleh gambaran yang menunjukkan kecenderungan peningkatan belanja maupun pendapatan desa selama tiga tahun (2019-2021), terdapat penurunan pada kedua komponen ini ditahun 2022, namun kembali meningkat ditahun 2023. Ukuran efisiensi alokasi dana desa (ADD) Desa Sipatuo secara konsisten menunjukkan nilai diatas 90% yang mengindikasikan bahwa keseimbangan antara belanja dan pendapatan tidak sama atau terdapat kondisi dimana belanja bernilai lebih besar dari pendapatan desa. Kondisi yang dimaksud terjadi pada tahun 2019 dengan persentase efisiensi sebesar 100,68% dengan

selisih anggaran antara belanja dan pendapatan sebesar Rp. 13.801.120. Hal yang sama juga terjadi ditahun 2020 dengan selisih anggaran yang lebih besar yakni Rp. 39.045.372, dengan persentase efisiensi sebesar 101,89%.

Sementara kondisi sebaliknya terjadi ditahun 2021 hingga 2023 dengan nilai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai belanja, apabila merujuk pada besaran persentase efisiensi, persentase efisien di tahun 2021 adalah sebesar 92,22%, 99,26% di tahun 2022, dan 94,51% di tahun 2023. Meskipun selama tiga tahun ini pendapatan desa lebih besar dibandingkan dengan belanja, persentase efisien menunjukkan tingkat efisiensi yang tidak efektif, sementara dalam hal besaran anggaran. Selisih anggaran terbesar terjadi di tahun 2021 dengan surplus anggaran sebesar Rp. 187.132.150, selisih terbesar selanjutnya terjadi di tahun 2023 dengan surplus anggaran sebesar Rp. 127.644.045 dengan persentase efisiensi sebesar 94,51%. Secara umum tingkat efisiensi tersebesar yang pernah dialami oleh pemerintah Desa Sipatuo dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah di tahun 2021 dengan persentase sebesar 92,22 persen, dan 94,51 persen di tahun 2023.

Merujuk pada maksud efisiensi, suatu pengelolaan keuangan akan dikatakan efisien apabila pemerintah desa mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Dalam konteks Desa Sipatuo, diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan besarannya hampir sama dengan pendapatan yang diperoleh, hal ini menunjukkan efisiensi yang rendah,

dikarenakan nilai yang pendapatan dan belanja memiliki besaran yang hampir sama, bahkan di tahun 2019 dan 2020, anggaran yang dikeluarkan untuk belanja memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

### 3. Analisis Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertumbuhan Alokasi Dana Desa juga memberikan cerminan yang cukup signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Pertumbuhan mampu memberikan gambaran mengenai peningkatan yang terjadi pada anggaran yang dikelola pemerintah desa setiap tahunnya, pengambilan keputusan terhadap pertumbuhan cukup sederhana dengan melihat besaran persentase pertumbuhan, semakin besar persentase tersebut maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah dalam konteks pertumbuhan. Ukuran pertumbuhan didapatkan melalui rasio pertumbuhan yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan ADD} = \frac{\text{ADD Tahun Berjalan} - \text{ADD Tahun Lalu}}{\text{ADD Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.090.583.000 - 1.036.395.000}{1.036.395.000} \times 100\% = 5,23\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{983.872.000 - 1.090.583.000}{1.090.583.000} \times 100\% = -9,78\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{996.495.000 - 983.872.000}{983.872.000} \times 100\% = 1,28\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{998.940.000 - 996.495.000}{996.495.000} \times 100\% = 0,25\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.062.344.000 - 998.940.000}{998.940.000} \times 100\% = 6,35\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas , selanjutnya hasil perhitungan ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan penjelasan yang berkaitan dengan pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang tahun 2019-2023 yang dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 12. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan ADD Desa Sipatuo (2019-2023)**

Tahun	Anggaran	Pertumbuhan	Keterangan
2018	1.036.395.000	-	-
2019	1.090.583.000	5,23	Rendah
2020	983.872.000	-9,78	Rendah
2021	996.495.000	1,28	Rendah
2022	998.940.000	0,25	Rendah
2023	1.062.344.000	6,35	Rendah
Rata Rata		0,66	Rendah

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rasio pertumbuhan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sipatuo selama lima tahun terakhir, didapatkan nilai yang tidak pernah mencapai 10% yang seluruhnya memiliki persentase pertumbuhan yang rendah, persentase tertinggi terlihat pada tahun 2023 yakni 6,35%, dan terendah pada tahun 2020 yakni -9,78%. Persentase pada tahun 2020 menunjukkan angka yang bernilai negatif menandakan bahwa pada tahun ini terdapat penurunan anggaran ADD. Secara keseluruhan, meskipun

memiliki persentase yang rendah, tren peningkatan ADD selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran ADD terus bernilai positif menunjukkan bahwa pada Desa Sipatuo terdapat pertumbuhan ADD namun tidak dinilai sebagai pertumbuhan yang signifikan dengan mempertimbangkan besaran persentasenya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis laporan keuangan Desa Sipatuo diketahui bahwa anggaran alokasi dana desa pada Desa Sipatuo menunjukkan hasil yang mengindikasikan kecenderungan peningkatan anggaran selama tiga tahun terakhir (2021-2023), penurunan anggaran terjadi pada tahun 2020 dengan persentase penurunan sebesar 9,78%, hal potensial yang menyebabkan hal ini adalah alokasi dana pemerintah pusat untuk penanganan dampak dari wabah covid-19 ditahun 2020 lalu. Selain itu, diketahui bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup besar di tahun 2019 dengan persentase sebesar 5,23%, dan di tahun 2023 dengan persentase sebesar 6,35%. Secara umum merujuk pada nilai rata-rata rasio pertumbuhan didapatkan nilai sebesar 0,66% yang dinilai sangat rendah. Sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo ditinjau dari rasio pertumbuhan dinilai rendah dibuktikan dengan persentase pertumbuhan yang tidak mencapai 10%.

Hal penting yang direfleksikan dari rasio pertumbuhan menunjukkan adanya pertumbuhan negatif di tahun 2020, hal ini menunjukkan pengurangan

ADD yang terjadi akibat wabah Covid-19. Pertumbuhan ADD di dua tahun berikutnya juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebagai akibat dan dampak Covid-19 yang masih dirasakan. Peningkatan yang terjadi di tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah pusat kembali memberikan penambahan anggaran untuk berbagai program yang hendak dilaksanakan oleh Desa Sipatuo, menunjukkan proses pulihnya pengelolaan keuangan yang sempat mengalami guncangan hebat akibat dari wabah Covid-19 di tahun 2019.

### **C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **1. Efektivitas Alokasi Dana Desa**

Pengukuran efektivitas alokasi dana desa dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dengan mempertimbangkan ketercapaian realisasi alokasi dana desa dibandingkan dengan besaran anggaran. Dengan demikian rasio efektivitas alokasi dana desa mengilustrasikan mengenai kemampuan pemerintah Desa untuk merealisasikan alokasi dana desa dengan baik. Ukuran rasio efektivitas yang besar menunjukkan kinerja pemerintah desa yang dinilai baik, sehingga dalam konteks ini, semakin besar nilai rasio efektivitas maka semakin baik.

Rasio efektivitas ADD dalam penelitian ini menunjukkan persentase yang tergolong tinggi, sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Kasmir bahwa salah satu komponen utama yang menjadi bagian dari manajemen keuangan yang efektif adalah mampu mengelola aset secara efektif dan efisien. Sementara itu, nilai yang diperoleh juga dinilai selaras dengan konsep efektivitas yang diungkapkan oleh Harahap yang menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan

produktivitas atau peningkatan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio efektivitas diatas 90% dinilai sangat efektif sesuai dengan kriteria pengukuran yang diilustrasikan oleh Mashun.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Desa Sipatuo yang dinilai efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, salah satunya adalah Penelitian Fadli Alamsyah (2023), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tingkat efektivitas alokasi dana desa setiap tahunnya mencapai angka diatas 90%, dengan persentase tertinggi 99,28% dan persentase terendah yakni 93,50%, dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa alokasi dana desa di Desa Pemusiran dinilai efektif<sup>54</sup>. Hasil yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Nur Asiah dkk (2023) yang membuktikan efektivitas alokasi dana desa di Desa Limbur Merangin dengan menggunakan rasio efektivitas, hasil yang didapatkan menunjukkan persentase rasio efektivitas yang dominan diatas 90% selama 4 tahun terakhir<sup>55</sup>.

Selain kedua penelitian diatas, penelitian Rani Anjeli (2024) menemukan hasil yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar tahun 2018-2021 dinilai baik dengan rata-rata persentase efektivitas diatas 90% persen atau sebesar 99,88%. Hasil ini didapatkan dengan

<sup>54</sup> Alamsyah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” h. 53

<sup>55</sup> Asiah, Addiarrahman, and Muthmainnah, “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin.” h. 19

menggunakan rasio efektivitas sebagai instrumen pengukuran<sup>56</sup>. Penelitian Rasta Seviafani Hidayati dkk (2023) juga menunjukkan kinerja keuangan yang baik pada pengelolaan ADD di Desa Klungkung yang selama 4 tahun terakhir (2019-2022) menunjukkan persentase efektivitas dengan nilai diatas 90%. Meskipun demikian, cakupan penelitian ini juga mengakup tahun 2018 yang pada tahun tersebut persentase efektivitas hanya sebesar 46% yang dinilai tidak efektif<sup>57</sup>.

Berdasarkan refleksi dari penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan keselarasan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dominan menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi alokasi dana desa (ADD) akan selalu digunakan dengan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian juga mengindikasikan hal sama yang ditunjukkan dengan persentase rasio efektivitas dan rata-rata persentase rasio efektivitas yang nilainya selalu berada diatas 90%. Besaran persentase ini menunjukkan nilai atau besaran anggaran dan realisasi yang hampir setara menandakan bahwa Pemerintah Desa aktif dalam mengalokasikan dana desa dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan Desa Sipatuo.

## 2. Efisiensi Alokasi Dana Desa

Ukuran efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran atau keuangan daerah merefleksikan seberapa besar tingkat efisiensi terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dapat diketahui dengan

<sup>56</sup> Anjeli, "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar." h. 50

<sup>57</sup> Hidayati, Yuliarti, and Halim, "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan." h. 238

membandingkan *input* dan *output*. Fungsi fundamental dari pengukuran efisiensi ADD adalah untuk mengetahui apakah pengeluaran desa lebih kecil atau lebih besar dari pendapatannya. Berbeda dengan efektivitas, rasio efisiensi memiliki nilai yang berbanding terbalik, dimana persentase yang semakin kecil menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, sementara nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa dana yang dikelola tidak efisien.

Selaras dengan konsep Kasmir yang mengilustrasikan kegiatan pengelolaan dana yang meliputi pengumpulan dan penggunaan dana, rasio efisiensi dalam penelitian ini menunjukkan persentase yang kurang hingga tidak efisien, ilustrasi ini diperoleh dari selisih belanja dan pendapatan yang sangat sedikit. Di tahun 2019 dan 2020 besaran belanja bahkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Pernyataan tidak efisien dalam penelitian ini selaras dengan konsep Harahap yang menjelaskan bahwa semakin tinggi persentase efisiensi semakin tidak efisien anggaran yang dikelola. Efisiensi akan dinilai baik apabila desa mampu memperoleh lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan rasio efisiensi merefleksikan kemampuan instansi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang lebih besar sesuai dengan konsep Dilliana dan Herdi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa secara umum, efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sipatuo dinilai kurang efisien. Sejalan dengan hasil yang didapatkan, penelitian Iin Ivanda Listari dkk (2022)

melakukan analisis terhadap efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Karangdagangan tahun 2018-2021 menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dinilai kurang efisien dengan persentase rasio efektivitas yang dominan bernilai diatas 95%<sup>58</sup>. Selanjutnya, penelitian Andi Nurwana dan Agus Purwanto Akbar (2023) menganalisis kinerja keuangan di Desa Lappangeng dan menemukan hasil yang menyatakan kurang efisiensinya kinerja keuangan pemerintah desa dengan persentase rasio efisiensi rata-rata diatas 90% atau sebesar 99,75%. Mengindikasikan bahwa belanja dan pendapatan desa masih tidak seimbang atau cenderung mengalami defisit anggaran akibat besaran belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan desa<sup>59</sup>.

Terdapat penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini, yakni penelitian Idam Eltri Zebua dkk (2023) dengan hasil penelitian yang berfokus pada kinerja keuangan pemerintah Desa Tumori, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa dinilai kurang efisien dengan nilai persentase rasio efisiensi diatas 90% pada tahun 2021 dan 2022, namun nilai ini sedikit lebih rendah di tahun 2019 dan 2020 yakni 87%<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> In Ivanda Listari, Kukuh Harianto, and Trisnia Widuri, “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021),” *Jurnal Mahasiswa - Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 3 (2022): 129–40. h. 135

<sup>59</sup> Andi Nurwana, Agus Purwanto, and Akbar Akbar, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone,” *PRECISE: Journal of Economic* 2, no. 1 (2023): 9–17. h. 13

<sup>60</sup> Idam Eltri Zebua et al., “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Dan Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tumori Kecamatan

Penelitian Ali Khadlirin et.al (2021) berfokus pada Desa Tegalarum menemukan hasil yang sama dengan indikasi kurang efisiennya pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan nilai persentase rasio efisiensi dengan rata-rata diatas 95%<sup>61</sup>.

Refleksi yang didapatkan dari beberapa penelitian terdahulu adalah kebutuhan pemerintah akan anggaran, sebagian besar desa masih mengalami kesulitan untuk membangun kemandirian dan kemampuan ekonomi yang mumpuni, hal ini tidak diungkapkan secara acak melainkan dengan melihat perbandingan antara belanja daerah dan pendapatan daerah yang seringkali tidak berimbang dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar, secara tidak langsung mengindikasikan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa yang kurang efisien. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Desa Sipatuo, namun kondisi ekonomi Desa Sipatuo mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir (2021-2023) dengan melihat kecenderungan pendapatan desa yang lebih besar dari belanja daerah, meskipun belum mencapai tingkat efisiensi tinggi, tapi arah pembangunan desa yang semakin baik pada akhirnya akan menciptakan efisiensi yang tinggi.

### 3. Pertumbuhan Alokasi Dana Desa

Pertumbuhan alokasi dana desa menunjukkan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan dana desa dengan baik sehingga dengan demikian terjadi

---

Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 6868–80. h. 6872

<sup>61</sup> Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, and Sri Yuni Widowati, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020),” SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi 19, no. 2 (2021): 49–64. h. 59

pertumbuhan. Pertumbuhan anggaran yang diberikan dapat terjadi akibat adanya pertambahan program atau perubahan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai program yang sebelumnya telah dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan penerima manfaat. Rasio pertumbuhan merupakan instrumen yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan alokasi dana desa yang akan memberikan gambaran akan kondisi keuangan pemerintah Desa Sipatuo.

Sesuai dengan namanya, rasio pertumbuhan menunjukkan penambahan ADD dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran sebelumnya, Harahap mengungkapkan bahwa rasio ini menunjukkan pertumbuhan pada pos-pos perusahaan, yang dalam ADD Desa Sipatuo ditunjukkan pada bidang dan sub-bidang anggaran. Dalam konteks ADD, pertumbuhan akan menunjukkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan jumlah Dana Desa setiap tahun anggaran, bahkan berpotensi untuk meningkat. Hasil penelitian ini memperlihatkan pertumbuhan ADD selama 3 tahun terakhir meskipun dengan nilai yang kurang signifikan, namun hal ini menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan negatif semasa Covid-19.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, penelitian Erviana Putri dkk (2024) melakukan analisis kinerja keuangan pada Desa Sungai Baru, hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan pertumbuhan alokasi dana desa yang dihitung dengan menggunakan rasio pertumbuhan tidak pernah mencapai angka diatas 25% yang secara langsung menyatakan bahwa pertumbuhan alokasi dana

desa pada Desa Sungai Baru tergolong rendah<sup>62</sup>. Selanjutnya, penelitian Dwi Supriati (2021) juga menunjukkan hasil yang sama pada Desa Sumber Sari dengan rasio pertumbuhan alokasi dana desa yang tidak pernah mencapai 50% di tahun 2016-2019, namun terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 yang setara dengan 127%<sup>63</sup>.

Penelitian lain yakni penelitian Via Vitaloka dkk (2024) juga menunjukkan hasil yang menyatakan kurang baiknya kinerja keuangan desa pada Desa Nanga Lebang dengan nilai rasio pertumbuhan yang rendah dari tahun 2019-2023, hal ini dinilai baik dari pendapatan maupun belanja desa yang pertumbuhannya masih tergolong rendah<sup>64</sup>. Sementara hasil yang sedikit berbeda ditemui dalam penelitian Yayu Sri Eva (2019) yang menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi baik pada pendapatan maupun belanja desa, namun penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan dengan menilai rasio pertumbuhan alokasi dana desa dinilai positif dengan pertumbuhan yang terus terjadi setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018<sup>65</sup>.

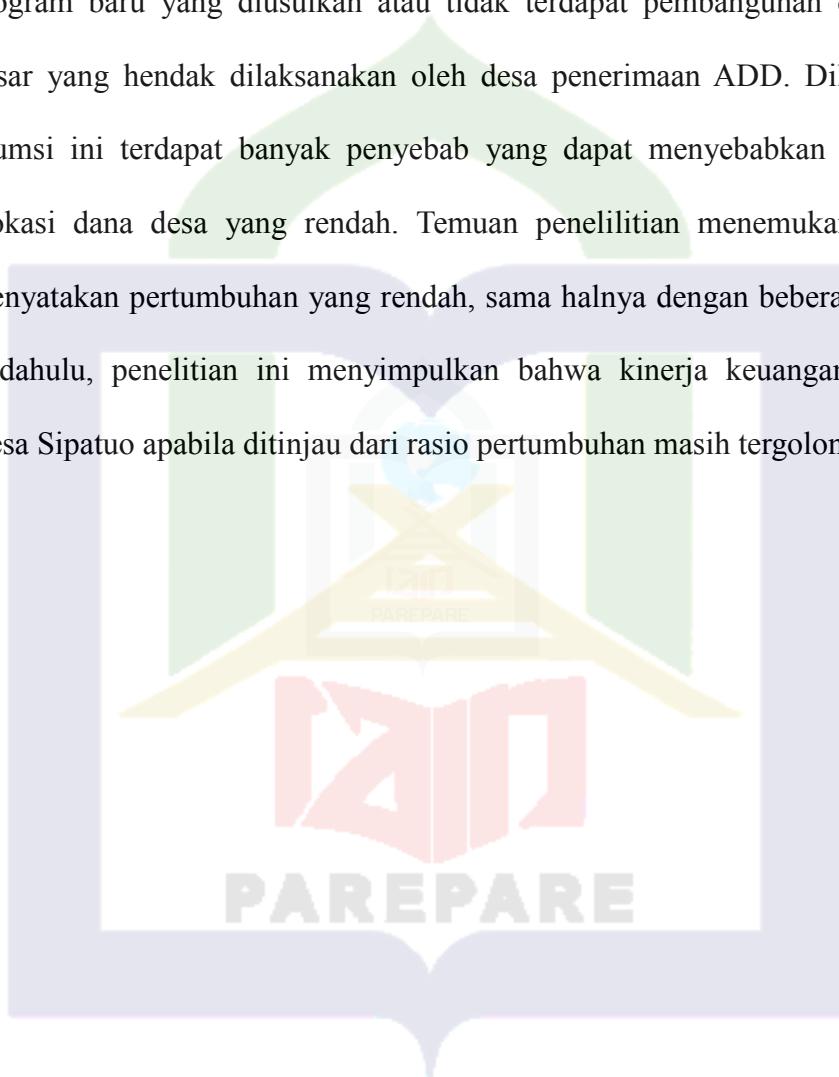
<sup>62</sup> Erviana Putri, Raju Maulana, and Edi Susanto, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir,” *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB* 1, no. 2 (2024): 128–35. h. 133

<sup>63</sup> Dwi Supriati, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021). h. 66

<sup>64</sup> Vitaloka, Firayanti, and Marhamah, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio Pertumbuhan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang).” h. 745

<sup>65</sup> Eva, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.” h. 54

Hasil penelitian ini merefleksikan nilai dari rasio pertumbuhan yang tergolong rendah, kondisi ini dapat ditemui dengan berbagai sebab. Pertumbuhan anggaran tidak diberikan kepada pemerintah desa akibat tidak adanya program-program baru yang diusulkan atau tidak terdapat pembangunan dengan skala besar yang hendak dilaksanakan oleh desa penerimaan ADD. Diluar daripada asumsi ini terdapat banyak penyebab yang dapat menyebabkan pertumbuhan alokasi dana desa yang rendah. Temuan penelitian menemukan hasil yang menyatakan pertumbuhan yang rendah, sama halnya dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Sipatuo apabila ditinjau dari rasio pertumbuhan masih tergolong rendah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah dilaksanakannya penelitian, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dinilai efektif, namun kurang efisien, serta memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah, hasil penelitian ini berfokus pada tahun anggaran 2019-2023. Uraian hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang menunjukkan hasil yang menyatakan kondisi yang efektif dengan persentase rata-rata sebesar 97,32%. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Sipatuo dinilai cukup efektif dengan memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk melaksanakan program-program, dan pembangunan pada Desa Sipatuo.
2. Rasio efisiensi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang, menunjukkan hasil yang menyatakan kurang efisiennya alokasi dana dengan nilai persentase rata-rata sebesar 97,71%. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa masih kerap kali terjadi defisit anggaran dimana pengeluaran atau belanja desa lebih besar dari pendapatannya.

3. Rasio pertumbuhan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang berada pada posisi rendah dengan nilai rata-rata 0,66%. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya penurunan anggaran di tahun 2020 sebesar 9,78%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan alokasi dana desa di Desa Sipatuo tidak memiliki nilai besar atau signifikan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk pengembangan penelitian ini, maupun sebagai referensi dalam perumusan kebijakan, saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang dinilai efektif, namun kurang efisien, dan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah. Dengan demikian disarankan kepada Pemerintah Desa Sipatuo untuk dapat semakin teliti dan jeli dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk memaksimalkan efisiensi dengan membangun potensi ekonomi Desa Sipatuo.
2. Disarankan pula kepada Pemerintah Desa Sipatuo agar senantiasa melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin, agar dapat mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan andal.
3. Sebagai saran untuk pengembangan penelitian, peneliti menyarankan agar dapat digunakan metode penelitian yang berfokus pada analisis faktual yang tidak hanya berfokus pada data sekunder namun juga pada reaksi dan pernyataan langsung pemerintah desa dan masyarakat pada Desa Sipatuo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Edited by Amir. 1st ed. Bogor: Azkiya Publishing, 2019.
- Alamsyah, Fadli. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Skripsi, Universitas Jambi, 2023.
- Anggraini, Novia, Iwan Harsono, and Siti Sriningsih. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2024): 1–8.
- Anjeli, Rani. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.
- Asiah, Nur, Addiarrahman Addiarrahman, and Muthmainnah Muthmainnah. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin." *Al-Dalil: Jurnal Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–21.
- Atmojo, Muhammad Eko, Helen Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, and Mardha Adhi Pratama. "Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo." *ARISTO* 5, no. 1 (2017): 126–40.
- Azhari, Ainin, and Dwi Suhartini. "Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding SeNAPaN (Seminar Nasional Akuntasi UPN Veteran JATIM)* 1, no. 1 (2021): 407–17.

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.
- Bilgies, Ana Fitriyatul, Kurniati Karim, Hengky Leon, Krisna Mutiara Wati, Endang Lifchatullaillah, Hendra Pribadi, Suparna Wijaya, et al. *Manajemen Keuangan*. Edited by Agung Anggoro Seto. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Dethan, Minarni Anaci. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 15–19.
- Dilliana, Siktania Maria, and Henrikus Herdi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edited by Dwi Winarni. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Eva, Yayu Sri. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Fitriana, Aning. *Analisis Laporan Keuangan*. Edited by Reza Rahmadi Hasibuan. 1st ed. Banyumas: Malik Rizki Amanah, 2024.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. 1st ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Hasan, Samsurijal, Elpisah Elpisah, Joko Sabtohadi, Nurwahidah Nurwahidah, Abdullah Abdullah, and Fachrurazi Fachrurazi. *Manajemen Keuangan*. Edited by Fachrurazi Fachrurazi. 1st ed. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Hidayati, Rasta Seviafani, Norita Citra Yuliarti, and Moh Halim. "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

- Dan Rasio Pertumbuhan.” *Jurnal Akuntasi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 6, no. 2 (2023): 232–49.
- Hutami, Andi Siti Sri. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 10–19.
- Irmansyah, Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid. “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 1086–95.
- Jaya, Asri, Sony Kuswandi, Cici Widya Prasetyandari, Imam Baidlowi, Mardiana Mardiana, Yudhistira Ardana, Aris Sunandes, Nurlina Nurlina, Palnus Palnus, and Murdin Muchsidin. *Manajemen Keuangan*. Edited by Fachrurazi. 1st ed. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. 9th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Pengantar Manajemen Keuangan*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur ’an Dan Terjemahan*, n.d.
- Khadlirin, Ali, Edy Mulyantomo, and Sri Yuni Widowati. “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020).” *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 19, no. 2 (2021): 49–64.
- Listari, Iin Ivanda, Kukuh Harianto, and Trisnia Widuri. “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021).” *Jurnal Mahasiswa - Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4, no. 3 (2022): 129–40.

Mahlel, Mahlel, Muhammad Ridwan, and Nasirwan Nasirwan. "Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2016): 22–41.

Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2016.

Mamuaja, Jovanca, Freddy Kawatu, and Anita Kambey. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *JAIM: Jurnal Akuntasi Manado* 2, no. 2 (2021): 249–58.

Marhaeni, Agung. A. I. N, I Ketut Subidia, and Andika Gede. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat - Membangun Desa, Membangun Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Bali: Sastra Utama, 2019.

Marhaeni, Agung. A. I. N, I Ketut Sudibia, and Gede Andika. *Dana Desa : Strategi Pengentasan Kemiskinan Indonesia - Membangun Desa & Menghapus Lingkaran Seta Kemiskinan*. 2nd ed. Bali: Sastra Utama, 2020.

Nugraha. *Desentralisasi Fiskal Dan Penguatan Keuangan Daerah*. Edited by Baban Sobandi. 2nd ed. Bandung: UPI Press, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Nurwana, Andi, Agus Purwanto, and Akbar Akbar. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone." *PRECISE: Journal of Economic* 2, no. 1 (2023): 9–17.

Putri, Erviana, Raju Maulana, and Edi Susanto. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB* 1, no. 2 (2024): 128–35.

Salmah. "Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap." Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

Siswanto, Ely. *Manajemen Keuangan Dasar*. 1st ed. Malang: Universitas Negeri Malang, 2021.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujarwени, Wiratna V. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sumarni, Mutia. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 5, no. 1 (2020): 77–90.

Supiyanto, Yudi, I Putu Hendra Martadinata, Marazaenal Adipta, Muhammad Rozali, Yogi Nurfauzi, Muhammad Fahmi, Sundari Sundari, Adria, Emiliyan Mamuki, and Supriadi Supriadi. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edited by Hommy Dorothy Ellyany Sinaga. 1st ed. Mataram: Sanabil Publishing, 2023.

Supriati, Dwi. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Telaumbanua, Aferiaman, and Noferius Ziliwu. "Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)* 1, no. 1 (August 17, 2022): 108–23.

Vitaloka, Via, Yuni Firayanti, and Marhamah Marhamah. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektifitas Dan Rasio

Pertumbuhan (Studi Kasus Pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang).” *SINERGI - Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 8 (2024): 737–51.

Yakin, Ipa Hafsiyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Uus Supriatna. 1st ed. Garut: Aksara Global Akademika, 2023.

Zebua, Idam Eltri, Dedi Irawan Zebua, Idarni Harefa, and Aferiaman Telaumbanua. “Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Dan Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6868–80.







DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : B-1759/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAAREPARE

- Menimbang
- a. Bahwa untuk menjaminkan kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
  - b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
  - b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Menetapkan
- a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
  - b. Menunjuk saudara: **Ismayanti, M.M.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
Nama Mahasiswa : SITI RAHMATIA KADIR  
NIM : 2120203861211009  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFektivitas DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA SIPATUO KABUPATEN PINRANG
  - c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 30 Mei 2024

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SITI RAHMATIA KADIR  
N I M : 2120203861211009  
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO  
EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA SIPATUO  
KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

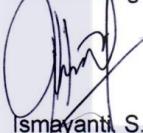
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS,  
EFISIENSI DAN PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA SIPATUO  
KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Mei 2025

Pembimbing Utama

  
Ismayanti, S.E., M.M.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 **Telepon** (0421) 21307 **Fax** (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-4701/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2024

01 November 2024

Sifat : Biasa

Lamiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	SITI RAHMATIA KADIR
Tempat/Tgl. Lahir	:	PINRANG, 15 Oktober 2002
NIM	:	2120203861211009
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	KAMP. CEGE, DESA SIPATUO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN PERTUMBUHAN PADA KANTOR DESA SIPATUO KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0591/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-11-2024 atas nama SITI RAHMATIA KADIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1340/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 07-11-2024  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0595/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 07-11-2024

**M E M U T U S K A N**

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: SITI RAHMATIA KADIR
4. Judul Penelitian	: ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan pada Kantor Desa SIPATUO KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: KANTOR DESA DAN MASYARAKAT DESA SIPATUO, KECAMATAN PATAMPANUA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Patampanua

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-05-2025.  
**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





PEMERINTAH DESA SIPATUO  
KECAMATAN PATAMPAWA  
KABUPATEN PINRANG  
Alamat, Jln Poros Malimpung Kode Pos91252

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 925/ ST / PP / XII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI MAPPA  
Jabatan : Kepala Desa Sipatuo

Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama : SITI RAHMATIA KADIR  
Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 15-10-2002  
Nim : 2120203861211009  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Jurusan : Manajemen Keuangan Syari'ah  
Pengurus Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Nama tersebut diatas telah melakukan penelitian, ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI, dan Pertumbuhan pada Kantor Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada Tanggal 4 November 2024 s/d 24 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran keterangan tersebut.

Sipatuo, 24 Desember 2024

Kepala Desa Sipatuo

ALL MAPPA



**LAPORAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 SEMESTER PERTAMA  
 PEMERINTAH DESA SIPATUO  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE BAGIANING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA					
2	3	4	5	6					
4.	<b>PENDAPATAN</b>								
4.2.	Pendapatan Transfer	2.039.102.000,00	625.937.000,00						
4.2.1.	Dana Desa	948.519.000,00	189.703.800,00						
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.090.583.000,00	436.233.200,00						
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.831.087,00	636.713,00						
4.3.6	Bunga Bank	1.831.087,00	636.713,00						
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.040.933.087,00</b>	<b>626.573.713,00</b>						
5.	<b>BELANJA</b>								
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>393.309.007,00</b>	<b>160.694.200,00</b>						
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	329.678.007,00	111.150.200,00						
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	20.250.000,00	ADD					
5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	20.250.000,00						
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	20.250.000,00						
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	11.600.000,00						
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	8.650.000,00						
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.064.800,00	65.341.200,00	ADD					
5.1.1.	Belanja Pegawai	198.064.800,00	65.341.200,00						
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.064.800,00	65.341.200,00						
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	169.864.800,00	54.191.200,00						
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	28.200.000,00	11.150.000,00						
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium)	41.863.207,00	14.634.000,00	ADD, DLL, PAD					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.863.207,00	14.634.000,00						
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.150.000,00	6.819.500,00						
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.258.500,00	4.851.500,00						
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.191.500,00	1.968.000,00						
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.700.000,00	0,00						
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	6.250.000,00						
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	6.250.000,00						
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.713.207,00	1.564.500,00						
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.113.207,00	0,00						
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	1.500.000,00						
5.2.5.08.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Dll)	0,00	64.500,00						

Printed by Siskeudes 30/12/2019 06:06:20

Halaman 1

KODE KEKINING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6
	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	10.925.000,00	ADD	
5.1.4	Tunjangan BPD	28.500.000,00	10.925.000,00		
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	10.925.000,00		
	<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum)</b>				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	ADD	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	0,00		
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	0,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00		
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	0,00		
	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>				
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	0,00	ADD	
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	0,00		
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.250.000,00	0,00		
	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>				
	<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah</b>	43.694.000,00	43.694.000,00		
5.3.	Belanja Modal	43.694.000,00	43.694.000,00	ADD	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Binaan	43.694.000,00	43.694.000,00		
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	12.650.000,00	12.650.000,00		
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.644.000,00	15.644.000,00		
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	15.400.000,00	15.400.000,00		
	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pengembangan</b>				
	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemdes</b>				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	5.850.000,00	DDS	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.750.000,00	5.850.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	600.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.750.000,00	5.250.000,00		
	<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Musdes)</b>				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	0,00	DDS	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.775.000,00	0,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525.000,00	0,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	0,00		
	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.412.000,00	0,00	DDS	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	967.000,00	0,00		
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	207.000,00	0,00		

KODE BUNTING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA					
2	3	4	5	6					
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.00	0.00						
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	540.000.00	0.00						
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.645.000.00	0.00						
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.000.00	0.00						
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	650.000.00	0.00						
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	795.000.00	0.00						
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	1.800.000.00	0.00						
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	1.800.000.00	0.00						
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.528.273.400,00</b>	<b>180.252.300,00</b>						
	Sub Bidang Pendidikan	218.002.600,00	20.000.000,00						
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bel	218.002.600,00	20.000.000,00	DDS					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00						
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	20.000.000,00	20.000.000,00						
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	20.000.000,00	20.000.000,00						
5.3.	Belanja Modal	198.002.600,00	0.00						
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	198.002.600,00	0.00						
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pe	3.883.550,00	0.00						
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	67.722.500,00	0.00						
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	126.396.550,00	0.00						
	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>42.190.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>						
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burni	27.600.000,00	9.000.000,00	DDS					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	9.000.000,00						
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.400.000,00	9.000.000,00						
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	23.400.000,00	9.000.000,00						
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	4.200.000,00	0.00						
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	4.200.000,00	0.00						
	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mu</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.590.000,00	0,00						
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	9.190.000,00	0,00						
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	670.000,00	0,00						
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	820.000,00	0,00						
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	0,00						
5.2.1.09.	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut	3.600.000,00	0,00						
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000,00	0,00						
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	0,00						
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00						

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6
121	5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	4.000.000,00	0,00		
121	5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.200.000,00	0,00		
122	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>955.988.100,00</b>	<b>44.258.100,00</b>		
122.1	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan</b>	<b>812.155.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ADD, DDS</b>	
122.1.1	<b>5.3. Belanja Modal</b>	<b>812.155.400,00</b>	<b>0,00</b>		
122.1.1.1	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	812.155.400,00	0,00		
122.1.1.2	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	15.922.700,00	0,00		
122.1.1.3	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	216.185.000,00	0,00		
122.1.1.4	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	580.047.700,00	0,00		
122.2	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan</b>	<b>39.165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DDS</b>	
122.2.1	<b>5.3. Belanja Modal</b>	<b>39.165.400,00</b>	<b>0,00</b>		
122.2.1.1	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	39.165.400,00	0,00		
122.2.1.2	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	767.000,00	0,00		
122.2.1.3	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.174.400,00	0,00		
122.2.1.4	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	800.000,00	0,00		
122.2.1.5	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	35.424.000,00	0,00		
122.3	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan</b>	<b>104.667.300,00</b>	<b>44.258.100,00</b>	<b>DDS</b>	
122.3.1	<b>5.3. Belanja Modal</b>	<b>104.667.300,00</b>	<b>44.258.100,00</b>		
122.3.1.1	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	104.667.300,00	44.258.100,00		
122.3.1.2	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.051.000,00	867.000,00		
122.3.1.3	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	40.289.500,00	20.195.500,00		
122.3.1.4	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	62.326.800,00	23.195.600,00		
14	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>307.592.700,00</b>	<b>104.744.200,00</b>		
1413	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman</b>	<b>307.592.700,00</b>	<b>104.744.200,00</b>	<b>DDS</b>	
1413.1	<b>5.3. Belanja Modal</b>	<b>307.592.700,00</b>	<b>104.744.200,00</b>		
1413.1.1	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persiapan	307.592.700,00	104.744.200,00		
1413.1.2	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim	6.029.000,00	2.053.000,00		
1413.1.3	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	139.604.500,00	51.580.000,00		
1413.1.4	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bakar	136.129.200,00	51.111.200,00		
1413.1.5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	25.830.000,00	0,00		
142	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
142.1	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon, Spanduk)</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>DDS</b>	
142.1.1	<b>5.2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
142.1.1.1	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	2.250.000,00		
142.1.1.2	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.500.000,00	2.250.000,00		
	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>48.880.000,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
3	4	5	6	
521.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	650.000,00	0,00	
522	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	0,00	
522.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	
522.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	1.500.000,00	0,00	
522.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	450.000,00	0,00	
524	Belanja Jasa Sewa	9.225.000,00	0,00	
524.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	9.225.000,00	0,00	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	61.828.000,00	0,00	
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelon	61.828.000,00	0,00	DDS
52.	Belanja Barang dan Jasa	61.828.000,00	0,00	
52.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.928.000,00	0,00	
52.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.931.000,00	0,00	
52.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	710.000,00	0,00	
52.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.300.000,00	0,00	
52.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.640.000,00	0,00	
52.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.347.000,00	0,00	
52.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.400.000,00	0,00	
52.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	400.000,00	0,00	
52.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	18.000.000,00	0,00	
52.4.	Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	0,00	
52.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA</b>	<b>9.190.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.190.800,00	0,00	
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.190.800,00	0,00	DDS
54.	Belanja Tidak Terduga	9.190.800,00	0,00	
54.1.	Belanja Tidak Terduga	9.190.800,00	0,00	
54.1.01.	Belanja Tidak Terduga	9.190.800,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.054.734.207,00</b>	<b>340.946.500,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(13.801.120,00)</b>	<b>285.627.213,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembayaran	13.801.120,00	13.801.120,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.801.120,00	13.801.120,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>13.801.120,00</b>	<b>13.801.120,00</b>	

DE NING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
2	3	4	5	6
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	299.428.333,00	



30/12/2019 06:06:20

Halaman 7

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER PERTAMA  
PEMERINTAH DESA SIPATUO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

E JING	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA				
				2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN							
4.2.	Pendapatan Transfer	1.941.283.000,00	1.601.572.000,00					
4.2.1.	Dana Desa	957.411.000,00	770.251.600,00					
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	983.872.000,00	831.320.400,00					
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.806.752,00	1.874.775,00					
4.3.6.	Bunga Bank	2.806.752,00	1.874.775,00					
	JUMLAH PENDAPATAN	1.944.089.752,00	1.603.446.775,00					
5.	BELANJA							
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>539.374.624,00</u>	<u>256.147.617,00</u>					
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	448.174.624,00	177.347.617,00					
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	23.750.000,00	ADD				
5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	23.750.000,00					
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	23.750.000,00					
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	13.750.000,00					
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	10.000.000,00					
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.800.700,00	85.176.000,00	ADD				
5.1.	Belanja Pegawai	249.800.700,00	85.176.000,00					
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.800.700,00	85.176.000,00					
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	218.600.700,00	75.226.000,00					
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	31.200.000,00	9.950.000,00					
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.380.000,00	11.571.317,00	ADD				
5.1.	Belanja Pegawai	24.380.000,00	11.571.317,00					
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.380.000,00	11.571.317,00					
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.100.000,00	0,00					
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	7.370.000,00	0,00					
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.970.000,00	2.371.200,00					
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.940.000,00	9.200.117,00					
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium)	81.993.924,00	41.475.300,00	ADD, DLL, PAD				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.993.924,00	41.475.300,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.040.000,00	21.181.200,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.740.000,00	13.940.000,00					
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	3.741.200,00					

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	VO				
				2	3	4	5	6
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.500.000,00	3.500.000,00						
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium	43.740.000,00	16.940.000,00						
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	14.000.000,00						
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	1.500.000,00						
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.140.000,00	1.440.000,00						
5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00						
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luer Kabupaten/Kota	3.000.000,00	0,00						
5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran	7.213.924,00	3.354.100,00						
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik	2.036.324,00	1.785.100,00						
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	1.500.000,00						
5.2.5.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Dll)	1.577.600,00	69.000,00						
Penyediaan Tunjangan BPD	28.500.000,00	11.875.000,00	ADD					
5.1. Belanja Pegawai	28.500.000,00	11.875.000,00						
5.1.4. Tunjangan BPD	28.500.000,00	11.875.000,00						
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	11.875.000,00						
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	3.500.000,00	3.500.000,00	ADD					
5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00						
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00						
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	695.000,00	695.000,00						
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00						
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.625.000,00	2.625.000,00						
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.000.000,00	0,00	ADD					
5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00						
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	0,00						
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.000.000,00	0,00						
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.800.000,00	78.800.000,00						
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	75.600.000,00	74.600.000,00	ADD					
5.3. Belanja Modal	75.600.000,00	74.600.000,00						
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Binaan	75.600.000,00	74.600.000,00						
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	21.500.000,00	20.500.000,00						
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00						
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	17.100.000,00	17.100.000,00						
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	17.000.000,00	17.000.000,00						
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00						
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana	4.200.000,00	4.200.000,00	ADD					
5.3. Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00						

ID	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
				4	5
2					
3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.200.000,00	4.200.000,00		
3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakar	4.200.000,00	4.200.000,00		
3.2.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sertifikat, Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	0,00	0,00		
3.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00		
3.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00		
3.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00		
5.2.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pengembangan Desa	11.400.000,00	0,00		
5.2.1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	5.700.000,00	0,00	DDS	
5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	0,00		
5.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	0,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	0,00		
5.2.2.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Musyawarah Desa)	5.700.000,00	0,00	DDS	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	0,00		
5.2.2.01.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	0,00		
5.2.2.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00		
5.2.2.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	0,00		
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>974.392.660,00</b>	<b>548.704.400,00</b>		
	Sub Bidang Pendidikan	213.897.850,00	20.000.000,00		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	193.897.850,00	0,00	DDS	
5.3.	Belanja Modal	193.897.850,00	0,00		
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	193.897.850,00	0,00		
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelatihan	3.801.900,00	0,00		
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	80.048.000,00	0,00		
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakar	110.047.950,00	0,00		
5.2.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belas	20.000.000,00	20.000.000,00	DDS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00		
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.600.000,00	1.600.000,00		
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.600.000,00	1.600.000,00		
5.3.	Belanja Modal	18.400.000,00	18.400.000,00		
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00		
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	18.400.000,00	18.400.000,00		
	Sub Bidang Kesehatan	55.877.040,00	18.000.000,00		
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik I	55.877.040,00	18.000.000,00	DDS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.877.040,00	18.000.000,00		

1	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
2	3	4	5	6
3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakar	4.200.000,00	4.200.000,00	
4.2.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sensus, Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	0,00	0,00	
4.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	DDS
4.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
4.2.1.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
5.2.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	11.400.000,00	0,00	
5.2.1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	5.700.000,00	0,00	DDS
5.2.1.05.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	0,00	
5.2.1.05.01.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	0,00	
5.2.1.05.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	
5.2.1.05.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	0,00	
5.2.1.05.04.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Muspida)	5.700.000,00	0,00	DDS
5.2.1.05.05.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	0,00	
5.2.1.05.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	
5.2.1.05.07.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	0,00	
5.3.	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>974.392.660,00</b>	<b>548.704.400,00</b>	
5.3.4.	Sub Bidang Pendidikan	213.897.850,00	20.000.000,00	
5.3.4.01.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sa	193.897.850,00	0,00	DDS
5.3.4.02.	Belanja Modal	193.897.850,00	0,00	
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	193.897.850,00	0,00	
5.3.4.03.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pel	3.801.900,00	0,00	
5.3.4.03.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	80.048.000,00	0,00	
5.3.4.03.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakar	110.047.950,00	0,00	
5.2.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bela	20.000.000,00	20.000.000,00	DDS
5.2.5.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.2.5.01.	Belanja Operasional Perkantoran	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.3.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.600.000,00	1.600.000,00	
5.3.9.	<b>Belanja Modal</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	
5.3.9.03.	Belanja Modal Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	
5.2.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagama	18.400.000,00	18.400.000,00	
5.2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>55.877.040,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik I	55.877.040,00	18.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.877.040,00	18.000.000,00	

IG	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA				
				2	3	4	5	6
2.2	Belanja Jasa Honorarium	43.200.000,00	18.000.000,00					
2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	43.200.000,00	18.000.000,00					
2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.677.040,00	0,00					
2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	12.677.040,00	0,00					
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	0,00	0,00	DDS				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00					
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00					
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00					
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00					
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00					
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00					
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	0,00	0,00					
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00					
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00					
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00					
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	561.294.070,00	436.380.700,00					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	476.633.700,00	413.966.500,00	ADD, DDS				
5.3.	Belanja Modal	476.633.700,00	413.966.500,00					
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	476.633.700,00	413.966.500,00					
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	9.340.100,00	8.111.400,00					
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	140.755.500,00	122.349.500,00					
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	326.538.100,00	283.505.600,00					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	10.071.770,00	10.071.700,00	DDS				
5.3.	Belanja Modal	10.071.770,00	10.071.700,00					
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	10.071.770,00	10.071.700,00					
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	196.290,00	196.220,00					
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00					
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	450.000,00	450.000,00					
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	9.425.480,00	9.425.480,00					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	74.588.600,00	12.342.500,00	DDS				
5.3.	Belanja Modal	74.588.600,00	12.342.500,00					
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	74.588.600,00	12.342.500,00					
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.462.400,00	242.000,00					
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.672.000,00	4.272.000,00					

**LAPORAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA SIPATUO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN 3	ANGGARAN (Rp) 4	REALISASI ANGGARAN (Rp) 5	SUMBER DANA 6
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	3.104.961,00	3.104.961,00	
Hasil Usaha Desa	3.104.961,00	3.104.961,00	
Pendapatan Transfer	2.364.992.000,00	2.364.992.000,00	
Dana Desa	1.368.497.000,00	1.368.497.000,00	
Alokasi Dana Desa	996.495.000,00	996.495.000,00	
Pendapatan Lain-lain	4.172.195,00	2.233.835,00	
Bunga Bank	4.172.195,00	2.233.835,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.372.269.156,00</b>	<b>2.370.330.796,00</b>	
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>664.609.706,00</b>	<b>653.821.262,00</b>	
Penyelenggaran Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional	432.286.206,00	425.872.762,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	ADD
Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	
1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02. Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	221.158.800,00	ADD
Belanja Pegawai	221.158.800,00	221.158.800,00	
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	221.158.800,00	
2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	196.558.800,00	
2.02. Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.357.088,00	17.356.962,00	ADD
Belanja Pegawai	17.357.088,00	17.356.962,00	
1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.357.088,00	17.356.962,00	
1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.556.800,00	3.556.800,00	
1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.800.288,00	13.800.162,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor)	99.570.318,00	94.057.000,00	ADD, DLL, PAD
Belanja Barang dan Jasa	99.570.318,00	94.057.000,00	
521. Belanja Barang Perlengkapan	34.281.000,00	33.261.000,00	
521.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.775.000,00	14.755.000,00	
521.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.201.000,00	7.201.000,00	

31/12/2021 10.12.52

Halaman 1

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Sumber Dana		
				3	4
				5	6
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.830.000,00	4.830.000,00			
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.475.000,00	6.475.000,00			
Belanja Jasa Honorarium	50.600.000,00	50.600.000,00			
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00			
Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/P	15.500.000,00	15.500.000,00			
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00			
Belanja Operasional Perkantoran	13.689.318,00	9.559.000,00			
Belanja Jasa Langganan Listrik	6.404.676,00	2.921.000,00			
Belanja Jasa Langganan Internet	6.500.000,00	6.500.000,00			
Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Dll)	784.842,00	138.000,00			
Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	637.000,00			
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	637.000,00			
Penyediaan Tunjangan BPD	28.500.000,00	27.600.000,00	ADD		
Belanja Pegawai	28.500.000,00	27.600.000,00			
Tunjangan BPD	28.500.000,00	27.600.000,00			
II. Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	27.600.000,00			
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	4.500.000,00	4.500.000,00	ADD		
Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00			
Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00			
I.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	645.000,00	645.000,00			
I.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00			
I.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.675.000,00	3.675.000,00			
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.200.000,00	4.200.000,00	ADD		
Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00			
I.5. Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	4.200.000,00			
I.5.08. Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	4.200.000,00	4.200.000,00			
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.700.000,00	46.700.000,00			
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint	46.700.000,00	46.700.000,00	ADD		
I.3. Belanja Modal	46.700.000,00	46.700.000,00			
I.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	46.700.000,00	46.700.000,00			
I.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer	45.200.000,00	45.200.000,00			
I.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	1.500.000,00	1.500.000,00			
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	185.623.500,00	181.248.500,00			
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	7.320.000,00	7.320.000,00	ADD		
I.2. Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	7.320.000,00			
I.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	7.320.000,00	7.320.000,00			

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus), Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	8.990.000,00	ADD
Belanja Barang Perlengkapan	9.150.000,00	8.990.000,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	240.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.750.000,00	8.750.000,00	
Pengembangan Sistem Informasi Desa, Belanja Barang dan Jasa	139.153.500,00	135.838.500,00	DDS
Belanja Barang Perlengkapan	96.371.500,00	96.371.500,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	86.571.500,00	86.571.500,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.605.000,00	1.605.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.147.300,00	17.147.300,00	
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	55.219.200,00	55.219.200,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.200.000,00	6.200.000,00	
Belanja Operasional Perkantoran	6.200.000,00	6.200.000,00	
Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	3.600.000,00	
Belanja Modal	42.782.000,00	39.467.000,00	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Binaan	42.782.000,00	39.467.000,00	
02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	11.250.000,00	11.250.000,00	
03. Belanja Modal Peralatan Komputer	31.532.000,00	28.217.000,00	
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaluran Bantuan, Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.100.000,00	ADD
Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	29.100.000,00	
1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.350.000,00	13.350.000,00	
1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	1.760.000,00	
1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	315.000,00	315.000,00	
1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.2. Belanja Jasa Honorarium	5.775.000,00	5.775.000,00	
2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	15.750.000,00	
2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.250.000,00	11.250.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	5.400.000,00	4.500.000,00	
Sub Bidang Pendidikan	776.528.300,00	775.028.300,00	
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	6.000.000,00	4.500.000,00	
02. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.500.000,00	DDS

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Jasa Honorarium	6 000 000,00	4 500 000,00	
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6 000 000,00	4 500 000,00	
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Jasa Honorarium	459.982.000,00	459.982.000,00	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	126.421.000,00	126.421.000,00	DDS
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	126.421.000,00	126.421.000,00	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	50.400.000,00	50.400.000,00	
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	50.400.000,00	50.400.000,00	
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	76.021.000,00	76.021.000,00	
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	76.021.000,00	76.021.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	13.911.000,00	13.911.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	13.911.000,00	13.911.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	7.411.000,00	7.411.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.301.000,00	1.301.000,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	1.400.000,00	
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.750.000,00	3.750.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	6.500.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultant	5.400.000,00	5.400.000,00	
Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	319.650.000,00	319.650.000,00	ADD, DDS
Belanja Barang dan Jasa	105.750.000,00	105.750.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	87.500.000,00	87.500.000,00	
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	75.700.000,00	75.700.000,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.700.000,00	7.700.000,00	
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	17.950.000,00	17.950.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.750.000,00	15.750.000,00	
Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	
Belanja Modal	213.900.000,00	213.900.000,00	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Binaan	4.250.000,00	4.250.000,00	
Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	4.250.000,00	4.250.000,00	
Belanja Modal Kendaraan	209.650.000,00	209.650.000,00	
Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	209.650.000,00	209.650.000,00	

URAIAN 3	ANGGARAN ( Rp ) 4	REALISASI ANGGARAN ( Rp ) 5	SUMBER DANA 6
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173.046.300,00	173.046.300,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl	15.595.800,00	15.595.800,00	ADD
Belanja Modal	15.595.800,00	15.595.800,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	15.595.800,00	15.595.800,00	
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	305.800,00	305.800,00	
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.490.000,00	2.490.000,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	12.800.000,00	12.800.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl	23.893.500,00	23.893.500,00	ADD
Belanja Modal	23.893.500,00	23.893.500,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	23.893.500,00	23.893.500,00	
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	468.500,00	468.500,00	
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	3.735.000,00	3.735.000,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.690.000,00	19.690.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jl	133.557.000,00	133.557.000,00	ADD
Belanja Modal	133.557.000,00	133.557.000,00	
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	133.557.000,00	133.557.000,00	
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.618.700,00	2.618.700,00	
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	67.111.500,00	67.111.500,00	
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	63.826.800,00	63.826.800,00	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih)	1.500.000,00	1.500.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	136.000.000,00	136.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Pras	136.000.000,00	136.000.000,00	ADD
Belanja Modal	136.000.000,00	136.000.000,00	
1.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi	136.000.000,00	136.000.000,00	
1.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	24.376.000,00	24.376.000,00	
1.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	111.624.000,00	111.624.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>32.160.000,00</b>	<b>32.160.000,00</b>	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	17.560.000,00	17.560.000,00	
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid.	17.560.000,00	17.560.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	17.560.000,00	17.560.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	6.410.000,00	6.410.000,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	990.000,00	990.000,00	

URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	470.000,00	470.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.450.000,00	2.450.000,00	
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	11.150.000,00	11.150.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	10.200.000,00	10.200.000,00	
<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	8.900.000,00	8.900.000,00	ADD
<b>Belanja Modal</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	
Belanja Modal Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00	
Belanja Khusus Olahraga	8.900.000,00	8.900.000,00	
<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	0,00	0,00	
<b>Pembinaan PKK</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	ADD
Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	5.700.000,00	
1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.700.000,00	5.700.000,00	
15. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
16. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	0,00	0,00	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>70.039.000,00</b>	<b>70.039.000,00</b>	
<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>21.436.000,00</b>	<b>21.436.000,00</b>	
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna u	21.436.000,00	21.436.000,00	DDS
1. Belanja Barang dan Jasa	21.436.000,00	21.436.000,00	
1.01. Belanja Barang Perlengkapan	10.136.000,00	10.136.000,00	
1.05. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	996.000,00	996.000,00	
1.06. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	470.000,00	470.000,00	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.450.000,00	2.450.000,00	

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
3	4	5	6
Belanja Bahan Material	3.720.000,00	3.720.000,00	
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	
Belanja Jasa Honorarium	11.300.000,00	11.300.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	10.200.000,00	10.200.000,00	
<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	ADD, DDS
Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	ADD, DDS
Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	21.000.000,00	21.000.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	
<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>13.603.000,00</b>	<b>13.603.000,00</b>	
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksana	13.603.000,00	13.603.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	13.603.000,00	13.603.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan	13.603.000,00	13.603.000,00	
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	13.603.000,00	13.603.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA</b>	<b>676.800.000,00</b>	<b>651.000.000,00</b>	
<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>676.800.000,00</b>	<b>651.000.000,00</b>	
Penanganan Keadaan Mendesak	676.800.000,00	651.000.000,00	DDS
Belanja Tidak Terduga	676.800.000,00	651.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga	676.800.000,00	651.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga	676.800.000,00	651.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.220.137.006,00</b>	<b>2.182.048.562,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>152.132.150,00</b>	<b>188.282.234,00</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1. Penerimaan Pembiayaan	63.245.500,00	63.245.500,00	
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	63.245.500,00	63.245.500,00	
6.2. Pengeluaran Pembiayaan	215.377.650,00	215.377.650,00	
6.2.2. Penyertaan Modal Desa	215.377.650,00	215.377.650,00	

URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
3	4	5	6
JUMLAH PEMBIAYAAN	(152.132.150,00)	(152.132.150,00)	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	36.150.084,00	

SIPATUO, 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIPATUO  
*[Signature]*  
ALI MAPPA



31/12/2021 17.48.56

Halaman 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**SEMESTER AKHIR TAHUN**  
**PEMERINTAH DESA SIPATUO**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KEL ANG G	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
<b>3</b>				
		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	2.898.750,00	12.402.350,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.898.750,00	12.402.350,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.963.309.000,00	1.963.562.272,00	
1.2.1.	Dana Desa	964.369.000,00	964.369.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	998.940.000,00	999.193.272,00	
1.3.	Pendapatan Lain-lain	2.233.835,00	2.655.606,00	
1.3.6.	Bunga Bank	2.233.835,00	2.655.606,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.968.441.585,00</b>	<b>1.978.620.228,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>757.790.669,00</b>	<b>724.748.707,00</b>	
	Penyelenggaran Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional	636.285.669,00	605.233.707,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	ADD
2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.567.900,00	270.391.272,00	ADD
2.1.2.	Belanja Pegawai	288.567.900,00	270.391.272,00	
2.1.2.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.567.900,00	270.391.272,00	
2.1.2.01.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	256.617.900,00	240.491.272,00	
2.1.2.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa	31.950.000,00	29.900.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.750.723,00	20.758.103,00	ADD
2.1.3.	Belanja Pegawai	21.750.723,00	20.758.103,00	
2.1.3.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.750.723,00	20.758.103,00	
2.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.744.000,00	3.744.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor)	18.006.723,00	17.014.103,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.667.046,00	199.684.332,00	ADD, DLL, PAD
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	59.210.000,00	58.902.582,00	
2.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16.385.000,00	16.385.000,00	
2.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	1.930.000,00	1.930.000,00	

G	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA			
2	3	4	5	6			
2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Per	2.500.000,00	2.472.582,00				
2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.095.000,00	10.095.000,00				
2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	6.910.000,00				
2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.100.000,00	2.910.000,00				
2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	18.200.000,00	18.200.000,00				
2.2	Belanja Jasa Honorarium	84.150.000,00	83.500.000,00				
2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00				
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/P	18.000.000,00	18.000.000,00				
2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.500.000,00	10.500.000,00				
2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	49.650.000,00	49.000.000,00				
3	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	35.829.500,00				
3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.930.000,00				
3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	34.000.000,00	30.899.500,00				
5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.927.046,00	17.977.250,00				
5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.027.046,00	3.930.000,00				
5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	5.100.000,00	5.100.000,00				
5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.800.000,00	7.800.000,00				
5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	3.500.000,00	1.009.250,00				
5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	500.000,00	138.000,00				
16.	Belanja Pemeliharaan	5.380.000,00	3.475.000,00				
16.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.380.000,00	2.475.000,00				
16.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.000.000,00	1.000.000,00				
	Penyediaan Tunjangan BPD	43.800.000,00	41.900.000,00	ADD			
1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	41.900.000,00				
1.4.	Tunjangan BPD	43.800.000,00	41.900.000,00				
1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	43.800.000,00	41.900.000,00				
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	5.000.000,00	5.000.000,00	ADD			
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00				
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.020.000,00	4.020.000,00				
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	380.000,00	380.000,00				
2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.640.000,00	3.640.000,00				
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	980.000,00	980.000,00				
2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	980.000,00	980.000,00				
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.500.000,00	7.500.000,00	ADD			
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00				
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	360.000,00	360.000,00				

IG	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA			
2	3	4	5	6			
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	360.000,00	360.000,00				
2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.140.000,00	7.140.000,00				
2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	7.140.000,00	7.140.000,00				
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	76.050.000,00	76.050.000,00				
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	76.050.000,00	76.050.000,00	ADD			
1.	Belanja Modal	76.050.000,00	76.050.000,00				
1.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Binaan	76.050.000,00	76.050.000,00				
1.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	17.000.000,00	17.000.000,00				
1.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.500.000,00	22.500.000,00				
1.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	26.550.000,00	26.550.000,00				
1.2.10.	Belanja Modal Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00				
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	45.455.000,00	43.465.000,00				
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	2.385.000,00	2.385.000,00	ADD			
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	2.385.000,00				
1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.385.000,00	2.385.000,00				
1.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.275.000,00	2.275.000,00				
1.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	110.000,00	110.000,00				
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,	9.300.000,00	9.080.000,00	ADD			
1.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.080.000,00				
1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.300.000,00	9.080.000,00				
1.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.750.000,00	8.750.000,00				
1.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	550.000,00	330.000,00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/	13.590.000,00	13.415.000,00	ADD			
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.590.000,00	13.415.000,00				
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.490.000,00	8.315.000,00				
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.050.000,00	7.875.000,00				
2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	440.000,00	440.000,00				
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.100.000,00	5.100.000,00				
2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00				
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset	10.080.000,00	9.930.000,00	ADD			
2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	9.930.000,00				
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.080.000,00	9.930.000,00				
2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	9.930.000,00				
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.100.000,00	8.655.000,00	DDS			
2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	8.655.000,00				
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	5.055.000,00				

6	URAIAN 3	ANGGARAN ( Rp ) 4	REALISASI ANGGARAN ( Rp ) 5	SUMBER DANA 6
2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.500.000,00	5.055.000,00	
2.5	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.05	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	3.600.000,00	
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>469.552.550,00</b>	<b>464.507.100,00</b>	
	Sub Bidang Kesehatan	183.519.000,00	180.719.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi	126.600.000,00	126.600.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	126.600.000,00	126.600.000,00	
2.	Belanja Jasa Honorarium	86.400.000,00	86.400.000,00	
2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	86.400.000,00	86.400.000,00	
7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	40.200.000,00	40.200.000,00	
7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	40.200.000,00	40.200.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M	9.144.000,00	9.144.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	9.144.000,00	9.144.000,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.144.000,00	9.144.000,00	
1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.144.000,00	9.144.000,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.525.000,00	13.725.000,00	DDS
	Belanja Barang dan Jasa	16.525.000,00	13.725.000,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.525.000,00	13.725.000,00	
1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan I	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	0,00	
1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.225.000,00	3.225.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sa	31.250.000,00	31.250.000,00	ADD
	Belanja Modal	31.250.000,00	31.250.000,00	
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	31.250.000,00	31.250.000,00	
2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	20.400.000,00	20.400.000,00	
2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	10.850.000,00	10.850.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	284.038.550,00	281.793.100,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl	17.566.550,00	17.303.050,00	ADD
	Belanja Modal	17.566.550,00	17.303.050,00	
1.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	17.566.550,00	17.303.050,00	
1.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	263.500,00	0,00	
1.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.153.050,00	2.153.050,00	
1.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	15.150.000,00	15.150.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl	70.527.750,00	70.527.750,00	DDS
	Belanja Modal	70.527.750,00	70.527.750,00	

6	URAIAN 3	ANGGARAN ( Rp ) 4	REALISASI ANGGARAN ( Rp ) 5	SUMBER DANA 6
2	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	70.527.750,00	70.527.750,00	
1.5	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	450.000,00	450.000,00	
5.03	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	70.077.750,00	70.077.750,00	
5.04	Belanja Modal Jalan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jl	62.190.800,00	62.190.800,00	DDS
	Belanja Modal	62.190.800,00	62.190.800,00	
6.	Belanja Modal Jembatan	62.190.800,00	62.190.800,00	
6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	19.294.800,00	19.294.800,00	
6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	42.896.000,00	42.896.000,00	
	Belanja Modal Jalan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	133.753.450,00	131.771.500,00	ADD
	Belanja Modal	133.753.450,00	131.771.500,00	
5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	133.753.450,00	131.771.500,00	
5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.981.950,00	0,00	
5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	66.147.500,00	66.147.500,00	
5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	65.624.000,00	65.624.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.995.000,00	1.995.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balon)	1.995.000,00	1.995.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	1.995.000,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.995.000,00	1.995.000,00	
1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.995.000,00	1.995.000,00	
	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>101.800.000,00</b>	<b>70.106.500,00</b>	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	63.000.000,00	36.000.000,00	
	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	63.000.000,00	36.000.000,00	DDS
	Belanja Modal	63.000.000,00	36.000.000,00	
14.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	63.000.000,00	36.000.000,00	
14.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bakar	63.000.000,00	36.000.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.800.000,00	23.800.000,00	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	23.800.000,00	23.800.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	23.800.000,00	
17.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	23.800.000,00	23.800.000,00	
17.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	23.800.000,00	23.800.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	10.306.500,00	
2.	Pembinaan PKK	15.000.000,00	10.306.500,00	ADD
2.1.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.306.500,00	
2.1.05.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	3.500.000,00	
2.1.08.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	3.500.000,00	
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.550.000,00	0,00	

G	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA
2		4	5	6
1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	6.806.500,00	
1.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.000.000,00	6.806.500,00	
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>200.023.450,00</b>	<b>198.123.450,00</b>	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	161.471.450,00	161.471.450,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	161.471.450,00	161.471.450,00	DDS
	Belanja Modal	161.471.450,00	161.471.450,00	
7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persiapan	161.471.450,00	161.471.450,00	
7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	77.875.450,00	77.875.450,00	
7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bakar	83.596.000,00	83.596.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	38.552.000,00	36.652.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.900.000,00	0,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	0,00	
1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.900.000,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.300.000,00	13.300.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.300.000,00	13.300.000,00	
1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	13.300.000,00	13.300.000,00	
	Peningkatan Kapasitas BPD	23.352.000,00	23.352.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	23.352.000,00	23.352.000,00	
1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.352.000,00	23.352.000,00	
1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.352.000,00	23.352.000,00	
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA</b>	<b>424.800.000,00</b>	<b>424.800.000,00</b>	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	424.800.000,00	424.800.000,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak	424.800.000,00	424.800.000,00	DDS
	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	424.800.000,00	
1.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	424.800.000,00	
1.01.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	424.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.953.966.669,00</b>	<b>1.882.285.757,00</b>	
	<b>SURPLIS / (DEFISIT)</b>	<b>14.474.916,00</b>	<b>96.334.471,00</b>	
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
1.	Penerimaan Pembiayaan	36.150.084,00	36.150.084,00	
1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.150.084,00	36.150.084,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.625.000,00	50.625.000,00	
2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.625.000,00	50.625.000,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(14.474.916,00)</b>	<b>(14.474.916,00)</b>	



**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA SIPATUO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 6  
 Tahun : 2023

KODE REK	URAJAN	3	KEUJARAN	ANGGARAN (RP)	KELUJARAN	MENJADI	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA	9
1.	<b>PENDAPATAN</b>									
4.1.	Pendapatan Asli Desa			9.503.600,00			0,00	(9.503.600,00)		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			9.503.600,00			0,00	(9.503.600,00)		
1.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			9.503.600,00			0,00	(9.503.600,00)		
4.2.	Pendapatan Transfer			2.311.636.000,00			2.439.641.000,00	128.005.000,00		
4.2.1.	Dana Desa			1.249.262.000,00			1.377.297.000,00	128.005.000,00		
1.2.1.01	Dana Desa			1.249.262.000,00			1.377.297.000,00	128.005.000,00		
4.2.3	Alokasi Dana Desa			1.062.344.000,00			1.062.344.000,00	0,00		
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.062.344.000,00			1.062.344.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.655.606,00			6.108.106,00	3.452.500,00		
4.3.5.	Koreksi Kesiabilitan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			3.452.500,00	3.452.500,00		
1.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			3.452.500,00	3.452.500,00		
4.3.6	Bunga Bank			2.655.606,00			2.655.606,00	0,00		
1.3.6.01	Bunga Bank			2.655.606,00			2.655.606,00	0,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			2.323.793.206,00			2.445.745.106,00	121.953.900,00		
2.	<b>BELANJA</b>									
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			936.323.361,00			953.205.045,00	13.120.516,00		
1.1	Bayarolenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Makamal 30% untuk Kegiatan Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa)			733.059.361,00			725.417.445,00	127.612.116,00		
1.1.01	Belanja Pengawai			83.600.000,00		12 OB	63.600.000,00	0,00	ADD	
5.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			63.600.000,00			63.600.000,00	0,00		
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00			36.000.000,00	0,00		
1.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			0,00			0,00			

Printed by Sistedeus  
 26/09/2023 09:57:05

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
									ANGGARAN (Rp)	
1.01 5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			27.600.000,00		27.600.000,00				
1.02 5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	132 OB		317.358.000,00	132 OB	317.358.000,00			317.358.000,00	
1.02 5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			317.358.000,00		317.358.000,00			317.358.000,00	
1.02 5.1.2.01	Penyediaan Tetap Perangkat Desa			269.358.000,00		269.358.000,00			269.358.000,00	
1.02 5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			48.000.000,00		48.000.000,00			48.000.000,00	
1.03 5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	144 OP		31.626.624,00	144 OP	31.626.624,00			31.626.624,00	
1.03 5.1.3	Belanja Pegawai			31.626.624,00		31.626.624,00			31.626.624,00	
1.03 5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.744.000,00		3.744.000,00			3.744.000,00	
1.03 5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			27.882.624,00		27.882.624,00			27.882.624,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK			243.997.737,00	12 Bulan	243.997.737,00			235.740.237,00	
1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			243.997.737,00		243.997.737,00			231.246.237,00	
1.1.04 5.2.1.	Belanja Barang Periferikayana			69.587.100,00		69.587.100,00			70.739.930,00	
1.1.04 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.153.000,00		20.153.000,00			20.153.000,00	
1.1.04 5.2.1.03	Belanja Periferikayana Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.925.000,00		1.925.000,00			0,00	
1.1.04 5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasli/Ujung Tungku Pemadam Kebakara			5.675.000,00		5.675.000,00			0,00	
1.1.04 5.2.1.05	Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan			6.934.100,00		6.934.100,00			6.934.100,00	
1.1.04 5.2.1.06	Belanja Barang Korsusni (Makan/Minum)			13.100.000,00		13.100.000,00			13.100.000,00	
1.1.04 5.2.1.08	Belanja Bendera/Jambul/umbul/Spanduk			5.600.000,00		5.600.000,00			3.600.000,00	
1.1.04 5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Sesegian/Atribut			16.200.000,00		16.200.000,00			17.400.000,00	
1.1.04 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			96.800.000,00		96.800.000,00			96.800.000,00	
1.1.04 5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.800.000,00		12.800.000,00			12.800.000,00	
1.1.04 5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Ursur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas I			18.000.000,00		18.000.000,00			20.000.000,00	
1.1.04 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00		12.000.000,00			12.000.000,00	
1.1.04 5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PRPKD dan PKKD			54.000.000,00		54.000.000,00			54.000.000,00	
1.1.04 5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			48.995.000,00		48.995.000,00			31.811.692,00	
1.1.04 5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.175.000,00		8.175.000,00			6.815.000,00	
1.1.04 5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			38.620.000,00		38.620.000,00			(13.823.308,00)	

KODE REK	URAIAN	3	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	6	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	7	BERTAMBAH (BERKURANG)	8	SUMBERDANA
1.1.01 5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa		132 OB	27.600.000,00	132 OB	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	ADD
1.1.02 5.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			317.358.000,00			317.358.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02 5.1.2	Belanja Pegawai			317.358.000,00			317.358.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02 5.1.2.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			269.358.000,00			269.358.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02 5.1.2.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			48.000.000,00			48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	144 OP		31.626.624,00	144 OP		31.626.624,00	0,00	0,00	0,00	ADD
1.1.03 5.1	Belanja Pegawai			31.626.624,00			31.626.624,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03 5.1.3	Jaminan Sosial/Kepala Desa dan Perangkat Desa			31.626.624,00			31.626.624,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03 5.1.3.03	Jaminan Keterangakkerjaan Kepala Desa			3.744.000,00			3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.03 5.1.3.04	Jaminan Keterangakkerjaan Perangkat Desa			27.882.624,00			27.882.624,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK			243.997.737,00	12 Bulan		243.997.737,00	(8.257.500,00)	(8.257.500,00)	(12.757.500,00)	ADD, DLL, PAC
1.1.04 5.2	Belanja Barang dan Jasa			243.997.737,00			243.997.737,00	231.240.237,00	231.240.237,00	231.240.237,00	
1.1.04 5.2.1	Belanja Barang Perdagangan			69.587.100,00			69.587.100,00	70.739.939,00	70.739.939,00	1.152.830,00	
1.1.04 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.153.000,00			20.153.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.04 5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.925.000,00			1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.04 5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasli/Utang Tabung Pernasdam Kebakara			5.675.000,00			5.675.000,00	7.627.850,00	7.627.850,00	1.952.850,00	
1.1.04 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.934.100,00			6.934.100,00	6.934.100,00	6.934.100,00	0,00	
1.1.04 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.100.000,00			13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	
1.1.04 5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Sanduk			5.600.000,00			5.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.04 5.2.1.09	Belanja Paketan Dinas/Seragam/Airbut			16.200.000,00			16.200.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	1.200.000,00	
1.1.04 5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			96.800.000,00			96.800.000,00	98.800.000,00	98.800.000,00	2.000.000,00	
1.1.04 5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.800.000,00			12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
1.1.04 5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Ursur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas			18.000.000,00			18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.04 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.04 5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			54.000.000,00			54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.1.04 5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			46.985.000,00			46.985.000,00	31.811.892,00	31.811.892,00	(15.183.308,00)	
1.1.04 5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/kota			8.175.000,00			8.175.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00	(1.360.000,00)	
1.1.04 5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/kota			38.820.000,00			38.820.000,00	24.986.692,00	24.986.692,00	(13.823.308,00)	

KODE REK	URAIAN	3	4	5	6	7	ANGGARAN (RPI)	KELUARAN	BERITAMBAH	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1.1.04	5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran			23.615.837,00			22.888.815,00				(777.022,00)
1.1.04	5.2.5.01 Belanja Jasa Penggaman Listrik			7.515.637,00			6.878.115,00				1.463.478,00
1.1.04	5.2.5.03 Belanja Jasa Penggaman Majalah/Surat Kabar			6.000.000,00			4.800.000,00				(1.200.000,00)
1.1.04	5.2.5.05 Belanja Jasa Penggaman Internet			7.800.000,00			7.800.000,00				0,00
1.1.04	5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Jln/Pajak			2.000.000,00			1.009.500,00				(990.500,00)
1.1.04	5.2.5.99 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Dll)			300.000,00			300.000,00				0,00
1.1.04	5.2.6 Belanja Pemeliharaan			7.000.000,00			7.000.000,00				0,00
1.1.04	5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00			5.000.000,00				0,00
1.1.04	5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00			2.000.000,00				0,00
1.1.04	5.3 Belanja Modal			0,00			0,00				4.500.000,00
1.1.04	5.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bantuan			0,00			0,00				4.500.000,00
1.1.04	5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer			0,00			0,00				4.500.000,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD			84 OB			84 OB				ADD
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai			52.200.000,00			52.200.000,00				0,00
1.1.05	5.1.4. Tunjangan BPD			52.200.000,00			52.200.000,00				0,00
1.1.05	5.1.01. Tunjangan Kedudukan BPD			52.200.000,00			52.200.000,00				0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Bahan Barang dan Jasa)			1 Paket			5.500.000,00				ADD
1.1.06	5.2 Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00			5.500.000,00				0,00
1.1.06	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			4.520.000,00			4.520.000,00				0,00
1.1.06	5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320.000,00			320.000,00				0,00
1.1.06	5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Attribut			4.200.000,00			4.200.000,00				0,00
1.1.06	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium			980.000,00			980.000,00				0,00
1.1.06	5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pekaksana Kegiatan			980.000,00			980.000,00				0,00
1.1.07	Penyediaan Inventi/Operasional RT/RW			84 OB			84 OB				ADD
1.1.07	5.2 Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00			8.000.000,00				0,00
1.1.07	5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan			440.000,00			440.000,00				0,00
1.1.07	5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			440.000,00			440.000,00				0,00
1.1.07	5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran			7.580.000,00			7.580.000,00				0,00
1.1.07	5.2.5.08 Belanja Inventi/Operasional RT/RW			7.580.000,00			7.580.000,00				0,00

KODE REK	URAIAN	3	4	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN (RP)	ANGGARAN (RP)	BENTANGAN (BERKURANG)	SUMBERDANA
<i>1.1.08 5.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas</i>									
1.1.08 5.2.3					9.777.200,00	3 Paket	11.422.584,00	(19.354.616,00)	DDS
1.1.08 5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				9.777.200,00		11.422.584,00	(19.354.616,00)	
1.1.08 5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				2.777.200,00		1.700.000,00	(1.077.200,00)	
1.1.08 5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				7.000.000,00		8.220.000,00	1.220.000,00	
1.1.08 5.2.7.01	Belanja Bahan Perkembangan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				21.000.000,00		1.502.584,00	(19.497.416,00)	
1.2	<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>				21.000.000,00		1.502.584,00	(19.497.416,00)	
1.2.01	<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>				137.259.000,00	6 Paket	153.469.000,00	16.210.000,00	ADD
1.2.01 5.3					137.259.000,00		153.469.000,00	16.210.000,00	
1.2.01 5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				161.259.000,00		153.469.000,00	16.210.000,00	
1.2.01 5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				119.159.000,00		119.159.000,00	17.900.000,00	
1.2.01 5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer				0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.01 5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mesbelai dan Alkesos/ Ruangan				46.100.000,00		50.600.000,00	4.500.000,00	
1.2.01 5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur				30.200.000,00		36.800.000,00	8.400.000,00	
1.2.01 5.3.2.10	Belanja Modal Mesin				14.959.000,00		14.959.000,00	0,00	
1.2.01 5.3.3	Belanja Modal Kendaraan				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.2.01 5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor				34.000.000,00		34.310.000,00	34.310.000,00	
1.4	<i>Tata Piatra Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>				36.000.000,00		36.000.000,00	(1.690.000,00)	
1.4.01	<i>Penyelegaran dan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</i>				96.009.000,00		96.009.000,00	(1.690.000,00)	
1.4.01 5.2					1 Paket	2.400.000,00	1 Paket	2.400.000,00	0,00 DDS
1.4.01 5.2.1	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan				2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.4.01 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.4.01 5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
1.4.02	<i>Penyelegaran Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, remburg desa Nor</i>				150.000,00		150.000,00	0,00	
1.4.02 5.2	Belanja Barang dan Jasa				12.675.000,00	2 Paket	12.675.000,00	0,00 ADD, DDS	
1.4.02 5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				12.675.000,00		12.675.000,00	0,00	
1.4.02 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				11.925.000,00		11.925.000,00	0,00	

URUAN	KODE REK	URUAN	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAN (BERKURANG)		SUMBERDANA
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
1.4.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		750.000,00		750.000,00			
4.4.03	5.2.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)</b>	2 Paket	<b>10.225.000,00</b>	1 Paket	<b>10.225.000,00</b>			
4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan		10.225.000,00		10.225.000,00		0,00	DDS
1.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		<b>6.075.000,00</b>		<b>6.075.000,00</b>		0,00	
1.03	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		5.625.000,00		5.625.000,00		0,00	
03	5.2.1.08.	Belanja Jasa Honorarium		450.000,00		450.000,00		0,00	
03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		<b>4.150.000,00</b>		<b>4.150.000,00</b>		0,00	
03	5.2.2.01	<b>Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	1 Paket	<b>10.000.000,00</b>	1 Paket	<b>10.000.000,00</b>		0,00	ADD
05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.080.000,00		10.080.000,00		0,00	
05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>		0,00	
05	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		10.080.000,00		10.080.000,00		0,00	
08	5.2.	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	3 Paket	<b>30.625.000,00</b>	4 Paket	<b>38.906.600,00</b>		<b>8.281.600,00</b>	DBS
08	5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		12.625.000,00		20.906.600,00		8.281.600,00	
18	5.2.1.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		<b>1.725.000,00</b>		<b>8.006.600,00</b>		<b>6.281.600,00</b>	
18	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		1.448.000,00		1.448.000,00	
18	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		1.575.000,00		783.600,00		783.600,00	
18	5.2.1.08.	Belanja Jasa Honorarium		150.000,00		150.000,00		5.625.000,00	
18	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		<b>4.900.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	
18	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		0,00		4.900.000,00		2.000.000,00	
18	5.2.2.04.	Belanja Operasional Kantor		<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	
18	5.2.5.	Belanja Jasa Operasional Kantor		<b>18.000.000,00</b>		<b>18.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	
18	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00	
18	5.3.	Belanja Modal		<b>18.000.000,00</b>		<b>18.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	
18	5.3.6.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		<b>18.000.000,00</b>		<b>18.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	
18	5.3.8.03	Belanja Modal Pembangunan Desa		<b>784.056.816,00</b>		<b>846.977.809,00</b>		<b>139.078.016,00</b>	
		Sub Bidang Pendidikan		<b>8.250.000,00</b>		<b>8.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	3	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	7	ANGGARAN (Rp)	6	KELUARAN	MENJADI	BERTAMBAHAN (BERKURANG)	8	SUMBER/DANA
										BERKURANG		
2.1.03	2. 2	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	5 Orang	8.250.000,00	5 Orang	8.250.000,00	6			0,00	ADD	
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa		8.250.000,00		8.250.000,00				0,00		
2.1.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.250.000,00		8.250.000,00				0,00		
2.1.03	5.2.1.09	Belanja Barang Perfengkapan Lainnya		8.250.000,00		8.250.000,00				0,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan		205.147.000,00		205.147.000,00				0,00		
2.2.02	2.2.02	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkr Tarmahan, Kls Bumi, Lansia, Insekti</b>	4 Paket	129.400.000,00	4 Paket	129.400.000,00				0,00	DDS	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		129.400.000,00		129.400.000,00				0,00		
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelajaran Desa		86.400.000,00		86.400.000,00				0,00		
2.2.02	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelajaran Desa		86.400.000,00		86.400.000,00				0,00		
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		43.000.000,00		43.000.000,00				0,00		
2.2.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Perfengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		43.000.000,00		43.000.000,00				0,00		
2.2.03	2.2.03	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Biddang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan I</b>	2 Paket	70.147.000,00	2 Paket	70.147.000,00				0,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		70.147.000,00		70.147.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		16.797.000,00		16.797.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		5.632.000,00		5.632.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.690.000,00		1.690.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Milum)		6.075.000,00		6.075.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.1.09	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut		5.400.000,00		5.400.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.850.000,00		18.850.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.500.000,00		1.500.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/konsultant/Narasumber		12.550.000,00		12.550.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		4.800.000,00		4.800.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		32.500.000,00		32.500.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		18.500.000,00		18.500.000,00				0,00		
2.2.03	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		14.000.000,00		14.000.000,00				0,00		
2.2.09	2.2.09	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Sarana/Pengadaan Sarana/Prasarana/Pc</b>	1 Paket	6.800.000,00	1 Paket	6.800.000,00				0,00	DDS	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang Perlengkapan		5.600.000,00		5.600.000,00				0,00		
2.2.09	5.2.1.	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut		5.600.000,00		5.600.000,00				0,00		
2.2.09	5.2.1.09	Belanja Pakaiian Dinas/Seragam/Atribut		5.600.000,00		5.600.000,00				0,00		
				360.018.816,00		360.018.816,00				139.078.016,00		

KODE REK	URAIAN	3	SEMOLEK			MENJADI			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	7	8		
1	2	4	5	6	7	8	9			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F Belanja Modal	2 Paket	240.940.800,00	1 Paket	154.992.800,00	154.992.800,00	154.992.800,00	0,00	0,00	ADD
2.3.11	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan									
2.3.11	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja									
2.3.11	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material									
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tan/ (C Belanja Modal	2 Paket	109.495.000,00	2 Paket	196.510.216,00	196.510.216,00	196.510.216,00	139.078.016,00	139.078.016,00	DOS
2.3.12	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Sewa Perlalan									
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Corong, Belanja Modal	3 Paket	57.432.200,00	2 Paket	12.592.200,00	14.487.800,00	14.487.800,00	1.895.600,00	1.895.600,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material									
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Sewa Perlalan									
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Corong, Belanja Modal	2 Paket	28.515.800,00	2 Paket	28.515.800,00	28.515.800,00	28.515.800,00	0,00	0,00	DOS
2.3.14	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan									
2.3.14	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja									
2.3.14	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material									
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman									
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Djilid)	2 Paket	135.140.000,00	2 Paket	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00	0,00	0,00	DOS
2.4.13	Belanja Modal									
2.4.13	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan									
2.4.13	Belanja Modal Irigasi/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja									
2.4.13	Belanja Modal Irigasi/Drainage/dll - Bahan Baku/Material									
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Paket	3.500.000,00	2 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	DOS
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baitu Diri)									
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa									
2.6.02	Belanja Barang Perkengkapan									
2.6.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk									
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral									

KODE REK	URAIAN	3	4	5	6	7	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	SUMBERDANA	BERTAMBAH (BERKURANG)	
										SEMESTER	MERJAH
1	2									8	9
2.7.02	5.3	<i>Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Energi Alte</i>	1 Paket	54.000.000,00	1 Paket	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	DDS	
2.7.02	5.3.8	Belanja Modal		54.000.000,00		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
2.7.02	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		54.000.000,00		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00		
		<b>SIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		55.450.000,00		55.450.000,00	55.450.000,00	0,00	0,00		
3.3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>		30.150.000,00		30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00		
3.3.01	5.2	<i>Pengiriman Kantingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa Itkti</i>	1 Paket	30.150.000,00	1 Paket	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	ADD	
3.3.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa		30.150.000,00		30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00		
3.3.01	5.2.7.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		30.150.000,00		30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00		
3.4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>		30.150.000,00		30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00		
3.4.03	5.2	<i>Pembinaan PKK</i>	1 Paket	25.300.000,00		25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00		
3.4.03	5.2.3	Belanja Barang dan Jasa		18.000.000,00	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	ADD	
3.4.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
3.4.03	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1 Paket	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2	<i>Pelatihan Pembinaan Lembinga Kemasyarakatan</i>		7.300.000,00	1 Paket	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2.1.06	Belanja Barang Perlengkapan		2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2.2	Belanja Benda/Umbul-umbul/Standuk		4.900.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
3.4.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium		4.900.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		290.799.800,00		290.799.800,00	290.799.800,00	0,00	0,00		
4.2		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>		274.799.800,00	2 Paket	274.799.800,00	274.799.800,00	0,00	0,00	DDS	
4.2.06	5.3	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi/Tersier/Sederhan</i>	2 Paket	274.799.800,00		274.799.800,00	274.799.800,00	0,00	0,00		
4.2.06	5.3.7	Belanja Modal		274.799.800,00		274.799.800,00	274.799.800,00	0,00	0,00		
4.2.06	5.3.7.02	Belanja Modal Jaringan/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		274.799.800,00		274.799.800,00	274.799.800,00	0,00	0,00		
4.2.06	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tengah Kerja		128.719.800,00		128.719.800,00	128.719.800,00	0,00	0,00		
		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bakar/Material		146.080.000,00		146.080.000,00	146.080.000,00	0,00	0,00		
								16.000.000,00			

KODE REK	URUAN	3	4	5	6	7	8	9	PERATURAN (BERKURANG)	SUMBERDANA
									KELUARAN	
1	2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		16.000.000,00		16.000.000,00			16.000.000,00	0,00 ADD
4.3	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		16.000.000,00		16.000.000,00			16.000.000,00	0,00
	4.3.02	5.2		16.000.000,00		16.000.000,00			16.000.000,00	0,00
	4.3.02	5.2.1.		16.000.000,00		16.000.000,00			16.000.000,00	0,00
	4.3.02	5.2.1.99		16.000.000,00		16.000.000,00			16.000.000,00	0,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		246.600.000,00		242.100.000,00			242.100.000,00	(4.500.000,00)
	5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	(4.000.000,00)
	5.1.00	Peranggulangan Bencana		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	PAD
	5.1.00	5.4.		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	(4.000.000,00)
	5.1.00	5.4.1.		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	(4.000.000,00)
	5.1.00	5.4.1.01		4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	(4.000.000,00)
	5.2	Sub Bidang Kedaan Darurat		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	(500.000,00)
	5.2.00	Penanganan Kedaan Darurat		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	PAD
	5.2.00	5.4.		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	(500.000,00)
	5.2.00	5.4.1.		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	(500.000,00)
	5.2.00	5.4.1.01.		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	(500.000,00)
5.3		Sub Bidang Kedaan Mendesak		237.600.000,00		237.600.000,00			237.600.000,00	0,00 DDS
	5.3.00	Penanganan Kedaan Mendesak		237.600.000,00		237.600.000,00			237.600.000,00	0,00
	5.3.00	5.4.		237.600.000,00		237.600.000,00			237.600.000,00	0,00
	5.3.00	5.4.1.		237.600.000,00		237.600.000,00			237.600.000,00	0,00
	5.3.00	5.4.1.01.		237.600.000,00		237.600.000,00			237.600.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA		2.196.151.161,00		2.327.608.661,00			131.457.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		127.844.045,00		118.140.445,00			(16.503.600,00)	
3.		PEMBIAYAAN							81.859.555,00	9.503.800,00
	6.1.	Penerimaan Pembayaran							81.859.555,00	9.503.600,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya							61.859.555,00	9.503.600,00
	3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya							72.355.955,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembayaran							200.000.000,00	

KODE REK	URUAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA		
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 2 2	Penyertaan Modal Desa		200 000 000,00		200 000 000,00		0,00	
3 2 0 1	Penyetoran Modal Desa		200 000 000,00		200 000 000,00		0,00	
	PEMBIAYAAN NETT		(127.644.045,00)		(118.140.445,00)		9.503.500,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00		0,00	

Sipatuo, 25 Oktober 2023

## BIODATA PENULIS



**SITTI RAHMATIA KADIR**, Lahir di Pinrang pada hari Selasa 15 Oktober 2002 merupakan anak ketiga dari Bapak Kadir dan Ibu Suri. Pendidikan Sekolah Dasar di SD 218 Pinrang tahun 2010 sampai tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP 2 Patampanua pada tahun 2015 sampai tahun 2018, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA 5 Pinrang pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan Strata 1 di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah. Penulis pernah melaksanakan PPL pada tahun 2024 selama kurang lebih 1 bulan di BKUD Kota Pinrang, kemudian melaksanakan KKN Reguler pada tahun 2024 di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan Skripsinya dengan judul, **"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Pertumbuhan pada kantor Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang."**